



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH**

LAKIP

Tahun 2021



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KAB. POLEWALI MANDAR**



Kata Pengantar

10 Uji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan HidayahNya sehingga tugas –tugas Pemerintahan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar dapat diselesaikan.

LAKIP ini disusun sebagai perwujudan bagi terselenggaranya pemerintahan yang baik dan merupakan salah satu upaya untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar yang telah dilakukan selama tahun 2021, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi.

Sejalan dengan hasil tersebut, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021 yang memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan serta pencapaian tujuan dan sasarannya telah ditetapkan dalam Rencana KerjaTahun 2021 sebagai wujud pertanggungjawaban dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi.

Hasil pencapaian kinerja menyelenggarakan Pemerintahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar tidak terlepas dari kerjasama semua pihak baik dalam perumusan program kegiatan, maupun dalam inplementasi dan pelaksanaan pengawasannya.

Kami sadari dalam penyusunan ini masih jauh dari kesempurnaan dan belum sesuai dengan harapan, olehnya itu kami sangat mengharapkan kritikan dan saran dalam rangka penyempurnaan LAKIP ini sekaligus masukan dalam penyusunan LAKIP berikutnya.

Polewali, 12 Januari 2022

Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



ARIFIN HALIM, S.Sos.MSi

Pangkat : Pembina TK.I

NIP : 19670319 200012 1 003

Daftar isi

| | |
|---|------------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR TABEL | iv |
| DAFTAR GRAFIK | vi |
| LAMPIRAN | vii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.1.1. Latar Belakang..... | 1 |
| 1.1.2. Dasar Hukum..... | 3 |
| 1.1.3. Maksud dan Tujuan Pelaporan | 4 |
| 1.2 Kedudukan , Tugas Pokok dan Fungsi | 4 |
| 1.2.1 Kondisi Organisasi | 5 |
| 1.2.1.1 Kondisi Kelembagaan | 5 |
| 1.2.1.2 Kondisi Kepegawaian..... | 7 |
| 1.2.1.3 Kondisi Sarana dan Prasarana Penunjang..... | 11 |
| 1.2.2 Sistematika Penyajian..... | 19 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | 21 |
| 2.1 Rencana Strategis..... | 21 |
| 2.1.1 Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja | 22 |
| 2.1.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran | 22 |
| 2.1.2.1 Tujuan | 22 |
| 2.1.2.2 Sasaran | 23 |
| 2.2 Penetapan Kinerja Tahun 2021 | 26 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN | 36 |
| 3.1. Akuntabilitas Kinerja | 36 |
| 3.1.1. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja | 37 |
| 3.1.1.1. Capaian Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Kepatuhan terhadap Peraturan Daerah | 37 |

| | |
|--|-----------|
| 3.1.1.2. Capaian Sasaran 2 Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat..... | 48 |
| 3.1.1.3 Capaian Sasaran 3 Meningkatnya Kualitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja | 66 |
| 3.1.1.4 Capaian Sasaran 4 Meningkatnya Kesiapsiagaan Perlindungan Masyarakat | 72 |
| 3.1.1.5 Capaian Sasaran 5 Meningkatnya Kesiapsiagaan Pencegahan Bahaya Kebakaran | 74 |
| 3.1.1.6 Capaian Sasaran 6 Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran | 78 |
| 3.1.1.7 Capaian Sasaran 7 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja | 86 |
| 3.1.1.8 Capaian Sasaran 8 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat daerah..... | 87 |
| 3.2. Akuntabilitas Keuangan | 87 |
| BAB IV PENUTUP..... | 90 |
| 4.1 Simpulan..... | 90 |
| 4.2 Saran..... | 91 |



Daftar tabel

| | | |
|-----------|--|----|
| Tabel 1.1 | Berdasarkan Formasi Jabatan..... | 7 |
| Tabel 1.2 | Daftar Pejabat Struktural dan Fungsional Satpol PP Tahun 2021 | 8 |
| Tabel 1.3 | Berdasarkan Tingkat Pendidikan..... | 8 |
| Tabel 1.4 | Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang Satpol PP dan Damkar | 9 |
| Tabel 1.5 | Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja menurut jenjang DiklatpinTahun 2021 | 10 |
| Tabel1.6 | Jumlah Satpol PP dan Damkar yang telah mengikuti Bimtek dan Diklat Khusus | 10 |
| Tabel 1.7 | Banyaknya Pegawai berdasarkan Gender | 11 |
| Tabel1.8 | Sarana dan Prasarana | 11 |
| Tabel 1.9 | Kartu Inventaris Barang | 14 |
| Tabel 1.2 | Tujuan dan Sasaran Jangka menengah pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja | 24 |
| Tabel 2.2 | Sasaran dan Indikator Kinerjaserta Target Kinerja | 26 |
| Tabel 2.3 | Sasarn Program dan Indikator Renja Satpol PP Tahun 2021..... | 35 |
| Tabel 3.1 | Data Pelanggaran Perda Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021.. | 38 |
| Tabel 3.2 | Meningkatnya Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat..... | 48 |
| Tabel 3.3 | Data Kasus Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan yang di Tindaklanjuti Tahun 2021 | 51 |
| Tabel 3.4 | Jumlah Aksi Unjuk Rasa aksi damai dan Kerusuhan Massa Tahun 2021.. | 59 |
| Tabel 3.5 | Meningkatnya Kualitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja | 67 |
| Tabel 3.6 | Satuan Polisi Pamong Praja yang memenuhi Standar Kompetensi | 69 |

| | | |
|------------|--|----|
| Tabel 3.7 | Meningkatnya Kesiapsiagaan Perlindungan Masyarakat | 72 |
| Tabel 3.8 | Daftar Tenaga Satinmas yang telah dilatih dikabupaten | 73 |
| Tabel 3.9 | Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya kebakaran ... | 74 |
| Tabel 3.10 | Cakupan Pelayanan bencana kebakaran wilayah kabupaten..... | 75 |
| Tabel 3.11 | Tingkat Waktu tanggap (response time rate) daerah layanan WMK... | 75 |
| Tabel 3.12 | Daftar Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran | 77 |
| Tabel 3.13 | PK Tahun 2021 | 78 |
| Tabel 3.14 | Pagu Perubahan anggaran tahun 2021 | 82 |
| Tabel 3.15 | Belanja Aparatur Tahun 2020..... | 88 |
| Tabel 3.16 | Belanja Aparatur Tahun 2021..... | 88 |

Daftar grafik

| | |
|---|----|
| Grafik 1 Sistemika Penyajian Laporan akuntabilitas Kinerja Tahun 2021.... | 19 |
| Grafik 2 Persentase kasus pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti | 39 |
| Grafik 3.Persentase kasus pelanggaran K3 yang ditindaklanjuti | 53 |
| Grafik 4 Rasio pendistribusian Satpol PP terhadap jumlah Kecamatan | 71 |

Lampiran

Lampiran I : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021

Lampiran II : Penetapan Kinerja Tahun 2021

Lampiran III : Pengukuran Kinerja Tahun 2021

Lampiran IV : Pengukuran Kinerja Dan Realisasi Anggaran Tahun 2021

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

1.1.1. LATAR BELAKANG

Latar belakang penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Instansi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar dikarenakan adanya keinginan yang kuat untuk mewujudkan Good Governance, berlandaskan pada TAP MPR RI No.XI/MPR/1998 dan UU No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang aturan pelaksanaannya didasarkan pada INPRES No. 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Perwujudan Good Governance ini diimplementasikan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam tiga pilar Tata Pemerintahan yang baik yaitu Akuntabilitas, Partisipasi, dan Transparansi. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, antara lain, menyebutkan bahwa azas-azas umum Penyelenggaraan Negara meliputi asas Kepastian Hukum, asas Tertib Penyelenggaraan Negara, asas Kepentingan Umum, asas Keterbukaan, asas Proporsionalitas, asas Profesionalitas dan asas Akuntabilitas. Asas Akuntabilitas inilah yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengantisipasi perkembangan masyarakat yang dinamis, selaras dengan tuntutan era globalisasi dan Otonomi Daerah, maka kondisi Ketentraman dan Ketertiban Umum merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat di daerah. Karena itu tugas Kepala Daerah sebagai

penyelenggara Pemerintahan Umum praktis bertambah berat. Dalam kaitan ini keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar dalam jajaran perangkat Pemerintah Daerah mempunyai arti yang strategis dalam membantu Kepala Daerah di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Umum.

Sejalan dengan dasar pola dan struktur organisasi yang baru, struktur organisasi dan nomenklatur baru dengan peraturan daerah Kabupaten Polewali Mandar dengan **Nomor 12 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten polewali mandar** termasuk Satuan Polisi Pamong Praja dengan menyusun dasar / pedoman pelaksanaan tugas dalam rangka mendukung program Visi dan Misi Pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar, yang diaplikasikan melalui program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang harus dipertanggungjawabkan sebagai tolak ukur capaian kinerja yang merupakan penjabaran rencana strategis sebagai bentuk pelaksanaan keuangan berdasarkan **Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit pelaksana teknis daerah pada Dinas dan badan dilingkup Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar** Fungsi Pemadam Kebakaran bergabung dengan Satuan Polisi Pamong Praja menjadi UPTD Pemadam Kebakaran.

Sebagaimana sudah dijelaskan dalam pasal 255 ayat (1) **Undang-Undang 23 Tahun 2014 bahwa Satuan Polisi Pamong Praja** dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Dan semakin meningkatnya estalasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, dibuat pula Peraturan Pemerintah Nomor Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Akuntabilitas, sebagai salah satu pilar tata pemerintahan yang baik, merupakan pertanggungjawaban atas mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 ini disusun. LAKIP ini menyajikan capaian indikator kinerja sasaran sebagai hasil pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2021 yang merupakan pelaksanaan mandat yang diemban oleh Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dan juga sebagai pelaksanaan dari Inpres 7 tahun 1999 yang mengharuskan setiap instansi pemerintah menyusun laporan akuntabilitas. Selain itu LAKIP ini juga merupakan kebutuhan dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan

kinerja Satpol PP Kabupaten Polewali Mandar secara menyeluruh. Sebagai wujud implementasi akuntabilitas, maka dalam rangka mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, disampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 yang didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 – 2024.

.Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 ini disusun berdasarkan Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP ini menyajikan capaian kinerja dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar selama tahun 2021 yang merupakan pelaksanaan amanah yang diemban oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Walaupun Inpres 7 tahun 1999 memang mensyaratkan setiap Lembaga Instansi Pemerintah untuk menyusun laporan akuntabilitas, namun LAKIP ini juga merupakan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan pemerintah Kabupaten Polewali Mandar secara menyeluruh.

1.1.2. DASAR HUKUM

Landasan hukum penyusunan LAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat :

1. Undang Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
5. Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2010 tentang pedoman pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penatausahaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar No. 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten Polewali Mandar.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum
11. Peraturan Bupati nomor 44 tahun 2016 tentang kedudukan , susunan organisasi , tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar .
12. Peraturan Bupati Polewali Mandar 23 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014-2019.
13. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit pelaksana teknis daerah pada Dinas dan badan dilingkup Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar

1.1.3 MAKSUD DAN TUJUAN PELAPORAN

Adapun Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja adalah meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab. Sedangkan Tujuannya adalah sebagai wujud pertanggungjawaban SKPD dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi.

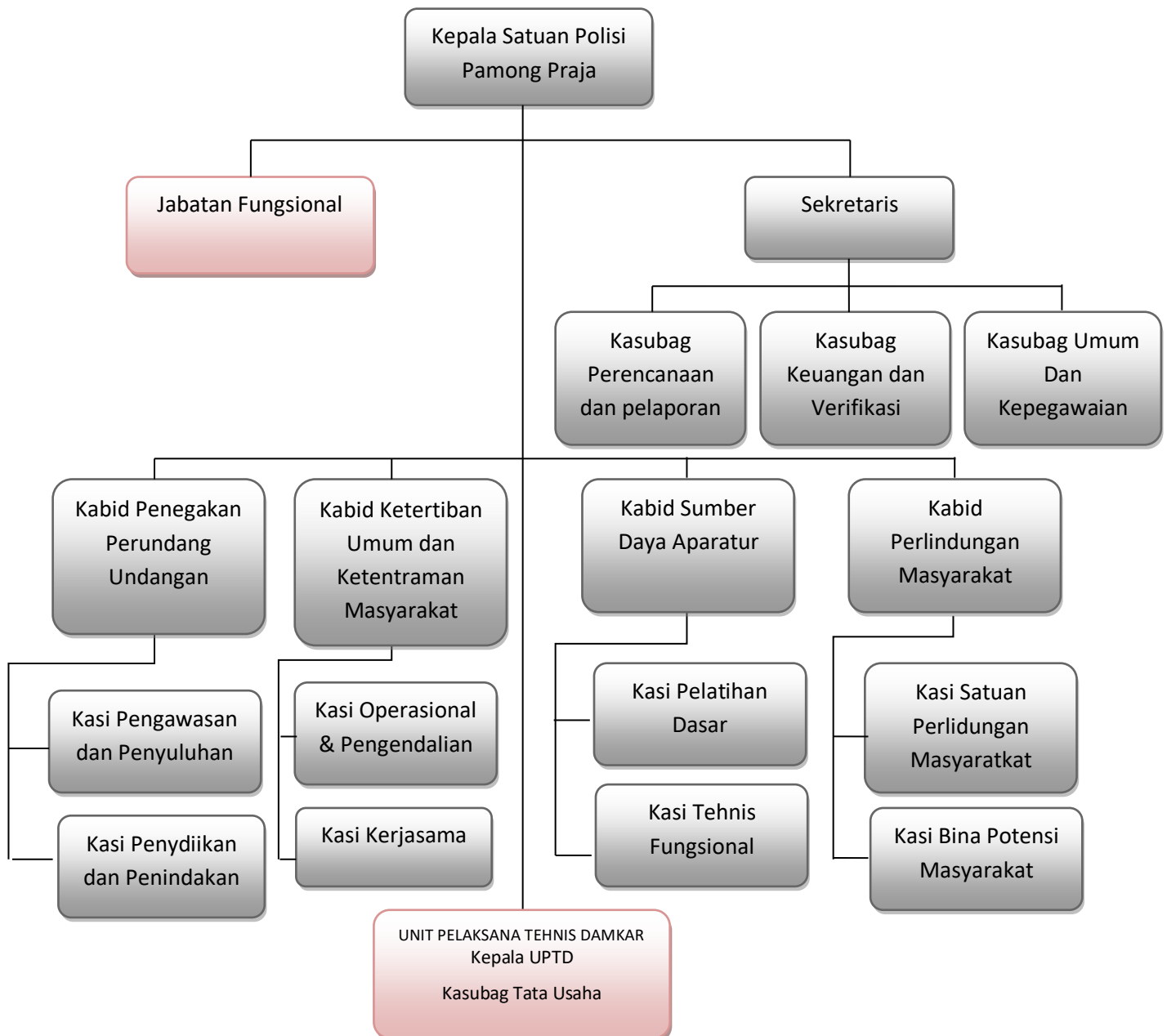
1.2. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1.2.1. KONDISI ORGANISASI

1.2.1.1 Kondisi Kelembagaan

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas, fungsi dan struktur organisasi yang tertentu. Satuan Polisi Pamong Praja, dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar No. 12 Tahun 2016 Tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Polewali Mandar , sebagai berikut :



Sebagaimana diatur Permendagri Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Satpol PP terbagi atas :

1. Pol PP Keterampilan
 - Pol PP Pelaksana Pemula
 - Pol PP Pelaksana
 - Pol PP Pelaksana Lanjutan
 - Pol PP Penyelia
2. Pol PP Keahlian
 - Pol PP Pertama
 - Pol PP Muda
 - Pol PP Madya

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Polewali Mandar No. 44 Tahun 2016 tentang kedudukan , susunan organisasi , tugas pokok dan fungsi serta tata kerja, maka Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

➤ **Tugas pokok**

Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlidungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah .

➤ **Fungsi**

- Perumusan kebijakan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlidungan Masyarakat ;
- Pelaksanaan kebijakan Ketentraman dan Ketertiban umum serta perlidungan masyarakat ;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan ketentraman dan ketertiban umum serta perlidungan masyarakat ;
- Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya ; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pembinaan terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dilakukan Bupati, dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat daerah yang dalam tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab dalam bidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum bersama Satuan Kerja Perangkat daerah lainnya.

Pengendalian terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama penyidik Pegawai Negeri Sipil SKPD terkait dengan kordinasi pihak Kepolisian sesuai dengan ketentuan Perundang undangan.

1.2.1.2 Kondisi Kepegawaian

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, diperlukan perangkat kerja yang mempunyai kompetensi pada bidang tugasnya masing-masing. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari PNS berdasarkan Jabatan , Tingkat Pendidikan, Pangkat, Golongan dan berdasarkan jenjang Diklatpim.

Tabel 1.1
Berdasarkan Formasi jabatan:

| No | Tingkat Jabatan | Eselon | Ket |
|-----|--|--------|-----|
| 1. | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja | II b | |
| 2. | Sekretaris | III a | |
| 3. | Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan | IIIb | |
| 4. | Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat | IIIb | |
| 5. | Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur | IIIb | |
| 6. | Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat | IIIb | |
| 7. | Kepala Sub. Bagian Perencanaan dan Pelaporan | IVa | |
| 8. | Kepala Sub. Bagian Keuangan dan Verifikasi | IVa | |
| 9. | Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian | IVa | |
| 10. | Kepala Seksi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan | IVa | |
| 11. | Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian | IVa | |
| 12. | Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan | IVa | |
| 13. | Kepala Seksi Kerjasama | IVa | |
| 14. | Kepala Seksi Pelatihan Dasar | IVa | |

| | | |
|-----|--|-----|
| 15. | Kepala Seksi Satuan Linmas | IVa |
| 16. | Kepala Seksi Teknis Fungsional | IVa |
| 17. | Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat | IVa |
| 18. | Kepala UPTD Pemadam Kebakaran | IVa |
| 19. | Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pemadam Kebakaran | IVb |

Tabel 1.2

Daftar Pejabat Struktural dan Fungsional Satpol PP Tahun 2021

| NO | Nama Pegawai | NIP | Tipe Jabatan (JFU/JFT/Struktural) | Nama Jabatan | Eselon | Golongan | Pendidikan |
|----|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|--------|----------|------------|
| 1 | Lowong | | Struktural | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja | | | |
| 2 | ARIFIN HALIM, S.Sos, M.Si | 196703192000121003 | Struktural | Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja | III.a | IV/B | S2 |
| 3 | MUHAMMAD WAIS HUSAIN | 196512311986121023 | Struktural | Kabid Trantibum dan Ketentraman Masyarakat | III.b | IV/A | SMA |
| 4 | Drs. MASDIH DJINI | 196904011991031018 | Struktural | Kabid Perlindungan Masyarakat | III.b | IV/A | S1 |
| 5 | ANDI SAGGAP RAHIM, S.Pd | 197201031992031008 | Struktural | Kabid Sumber Daya Aparatur | III.b | IV/A | S1 |
| 6 | MUHAMMAD YASIN, S.Sos | 196712311992031158 | Struktural | Kabid Penegakan Perundang undangan Daerah | III.b | IV/A | S1 |
| 7 | ABD. MAJID SYACHRIR, S.Sos | 198310072005021002 | Struktural | Kasubag Perencanaan dan Pelaporan | IV.a | III/C | S1 |
| 8 | SLAMET, S.Sos | 197805012002121005 | Struktural | Kasubag Keuangan dan Verifikasi | IV.a | III/B | S1 |
| 9 | Lowong | | Struktural | Kasubag Umum dan Kepegawaian | | | |
| 10 | ISNAENI, S. Sos | 197004122002121009 | Struktural | Kasi Kerjasama | IV.a | III/C | S1 |
| 11 | RAHMAT, S. Sos | 197112312002121027 | Struktural | Kasi Operasi Pengendalian | IV.a | III/C | S1 |
| 12 | MOCHAMMAD NUR SAFAAT, S.Sos | 197504122002121009 | Struktural | Kasi Teknis Fungsional | IV.a | III/C | S1 |
| 13 | NUR ALAMSYAH, S.Sos | 197710182002121009 | Struktural | Kasi Pelatihan Dasar | IV.a | III/C | S1 |
| 14 | YUSUF, SH | 197905162002121008 | Struktural | Kasi Penyelidikan dan Penindakan | IV.a | III/C | S1 |
| 15 | IMRAN, S.IP | 198207182009011007 | Struktural | Kasi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan | IV.a | III/B | S1 |
| 16 | AHMAD RASADA, S.Sos | 198101312002121005 | Struktural | Kasi Bina Potensi Masyarakat | IV.a | III/C | S1 |
| 17 | HASMAN, S.Sos | 197301102006041020 | Struktural | Kasi Satlinmas | IV.a | III/B | S1 |
| 18 | Lowong | | Struktural | Kepala UPTD Pemadam Kebakaran | | | |
| 19 | M. TADRIF RAIS, S.IP | 197612122005021008 | Struktural | Kasubag Tata Usha Damkar | IV.a | III/C | S1 |
| 20 | DEDY MACHMUD, S.Sos | 197903112002121009 | Fungsional | Pol PP Pertama | | III/B | S1 |
| 21 | SYAHARUDDIN | 197702122005021004 | Fungsional | Pol PP Pertama | | III/B | S1 |
| 22 | DJANIAR, S.Sos | 196809212002122004 | Fungsional | Pol PP Ahli Muda | | III/C | S1 |
| 23 | FADLI | 197112122009011008 | Fungsional | Pol PP Ahli Pratama | | III/B | S1 |
| 24 | ABD. RAHMAN, S.IP | 197212312009011024 | Fungsional | Pol PP Ahli Pratama | | III/B | S1 |
| 25 | AMIRULLAH, S.Hi | 197412252009011004 | Fungsional | Pol PP Ahli Pratama | | III/B | S1 |
| 26 | JASWAT YUSUF, S.IP | 197905072008011028 | Fungsional | Pol PP Ahli Pratama | | III/B | S1 |
| 27 | M. SOFIAN IDRUS, A.Md | 197312202006041019 | Fungsional | Pol PP Mahir | | III/B | S1 |
| 28 | MUHAMMAD RAIS.Z | 198002242008011005 | Fungsional | Pol PP Terampil | | III/B | S1 |
| 29 | HASANUDDIN | 198410142010011001 | Fungsional | Pol PP Terampil | | II/C | SMA |
| 30 | JAMALUDDIN | 197106152006041030 | Fungsional | Pol PP Terampil | | II/D | SMA |
| 31 | MUHAJIR | 197103222009011003 | Fungsional | Pol PP Terampil | | II/C | SMA |

Tabel 1.3

Berdasarkan Tingkat Pendidikan

| No. | Tingkat Pendidikan | Status Pegawai | | | | Jumlah |
|-----|--------------------|----------------|--------|--------------|--------|--------|
| | | PNS | | Non PNS | | |
| | | Satpol PP | Damkar | Satpol PP | Damkar | |
| 1 | Pasca Sarjana (S2) | 1 | - | - | - | 1 |

| | | | | | | |
|---------------|--------------|------------|----------|------------|-----------|------------|
| 2 | Sarjana (S1) | 73 | 1 | 24 | 8 | 106 |
| 3 | Diploma III | 1 | - | 2 | - | 3 |
| 4 | Diploma II | - | - | - | - | - |
| 5 | Diploma I | - | - | - | - | - |
| 6 | SLTA | 37 | - | 94 | 75 | 206 |
| 7 | SLTP | - | 2 | - | - | 2 |
| 8 | SD | - | - | - | - | - |
| JUMLAH | | 112 | 3 | 120 | 83 | 318 |

Tabel 1.4

Berdasarkan Pangkat / Golongan Ruang Satpol PP dan Damkar

| No. | Pangkat / Gol. Ruang | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | Keterangan |
|-----|----------------------------------|-----------|-----------|--------|------------|
| 1 | Pembina Utama / IV e | - | - | - | |
| 2 | Pembina Utama Madya/IV d | - | - | - | |
| 3 | Pembina Utama Muda / IV c | - | - | - | |
| 4 | Pembina Tk.I / IV b | 1 | - | 1 | |
| 5 | Pembina / IV a | 4 | - | 4 | |
| 6 | Penata Tk. I / III d | - | - | - | |
| 7 | Penata / III c | 36 | 3 | 39 | |
| 8 | Penata Muda Tk.I / III b | 28 | - | 28 | |
| 9 | Penata Muda / III a | 7 | - | 7 | |
| 10 | Pengatur Tk.I / II d | 24 | - | 24 | |
| 11 | Pengatur / II c | 9 | - | 9 | |
| 12 | Pengatur Muda / II b | 1 | - | 1 | |
| 13 | Pengatur Muda / II a | - | - | - | |
| 14 | Juru Tk. I / I d | 1 | - | 1 | |
| 15 | Juru / I c | 1 | - | 1 | |
| 16 | Juru Muda Tk. I / I b | - | - | - | |
| 17 | Juru Muda / I a | - | - | - | |
| 18 | Pegawai Tidak Tetap (PTT) Satpol | 104 | 16 | 120 | |

| | | | | | |
|--------------------|---|-----|----|-----|--|
| 19 | PP Pegawai Tidak Tetap (PTT) Damkar | 81 | 2 | 83 | |
| J U M L A H | | 297 | 21 | 318 | |

Tabel 1.5

Jumlah PNS Satuan Polisi Pamong Praja menurut Jenjang Diklatpim, Tahun 2021.

| Satuan Unit | DIKLATPIM | | | | Ket |
|----------------------------|-----------------|----------------|-----|-----|-----|
| | Belum Pernah | Pernah Diikuti | | | |
| | | IV | III | II | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Satuan Polisi Pamong Praja | 13 | 2 | 1 | - | - |
| Pemadam Kebakaran | 1 | - | - | - | - |
| Jumlah | 14 | 2 | 1 | - | - |

Tabel 1.6

Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang telah mengikuti Bimtek dan Diklat Khusus.

| Satuan Unit | PNS | | PTT | | Ket |
|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----|
| | Telah Mengikuti | Belum Mengikuti | Telah Mengikuti | Belum Mengikuti | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| SATPOL PP | | | | | |
| Diklat Dasar Satpol PP | 49 | 63 | - | - | |

| | | | | | |
|--|-----|-----|-----|----|--|
| Diklat Pembentukan PPNS | 4 | 108 | - | - | |
| Diklat Bela Negara | 4 | 108 | - | - | |
| Bimtek Peningkatan Kapasitas Satpol PP | 112 | - | 116 | 4 | |
| PEMADAM KEBAKARAN | | | | | |
| Bimtek Pemahaman Dasar Damkar | 3 | - | 63 | 20 | |
| Pendidikan Pemadam Kebakaran Kelas D | - | 3 | - | 83 | |
| Pendidikan Pemadam Kebakaran Kelas C | - | 3 | - | 83 | |
| Pendidikan Pemadam Kebakaran Kelas B | - | 3 | - | 83 | |
| Pendidikan Pemadam Kebakaran Kelas A | - | 3 | - | 83 | |
| | | | | | |

Tabel 1.7

Banyaknya PNS dan PTT berdasarkan Gender.

| Satuan Unit | Jenis Kelamin | | | | Jumlah |
|----------------------------|---------------|------------|-----------|-----------|------------|
| | Laki-Laki | | Perempuan | | |
| | PNS | PTT | PNS | PTT | |
| (1) | (2) | (3) | | (4) | |
| Satuan Polisi Pamong Praja | 109 | 104 | 3 | 16 | 232 |
| Pemadam Kebakaran | 3 | 81 | - | 2 | 86 |
| Jumlah | 112 | 185 | 3 | 18 | 318 |

1.2.1.3 Kondisi Sarana dan Prasarana Penunjang

Kondisi sarana dan prasarana penunjang dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 1.8

Sarana dan Prasarana

| No | Nama barang | Merk/ Type | Kondisi | Jumlah barang |
|----|------------------|------------|---------|---------------|
| 1 | Kendaraan roda 4 | ➤ Hilux | B | 2 Buah |

| | | | | |
|----|------------------|------------------|----|---------|
| | | ➤ Stayon Wagon | B | 1 Buah |
| | | ➤ Truk Damkar | B | 5 Unit |
| 2 | Kendaraan roda 2 | ➤ Trail Monstrac | RB | 1 Buah |
| | | ➤ Honda Fersa | B | 1 Buah |
| | | ➤ Scopy | B | 1 Buah |
| | | ➤ Honda Vario | B | 2 Buah |
| 3 | Lemari Arsip | ➤ Serbuk Kayu | B | 1 Buah |
| | | ➤ Lemari Sorok | B | 1 Buah |
| | | ➤ Dinamis | B | 2 Buah |
| 4 | Meja Kerja | ➤ 1 Biro | B | 5 Buah |
| | | ➤ ½ biro | B | 12 Buah |
| 5 | Meja Rapat | ➤ Lokal | B | 2 Buah |
| | | ➤ Lokal | RB | 2 Buah |
| 6 | Kursi Putar | ➤ Proline | RB | 2 Buah |
| | | ➤ Eksekutif | B | 5 Buah |
| 7 | Kursi Kerja | ➤ Futura | B | 16 Buah |
| 8 | Papan Data | ➤ Lokal | B | 1 Buah |
| 9 | Komputer | ➤ Asus | RB | 1 Buah |
| | | ➤ Pentium 4 | RB | 1 Buah |
| | | ➤ Benq | B | 1 Buah |
| 10 | Printer | ➤ Epson L360 | B | 1 Buah |
| | | ➤ Epson L365 | B | 1 Buah |
| | | ➤ Epson L450 | B | 1 Buah |
| | | ➤ Canon iP2770 | B | 2 Buah |
| | | ➤ Canon mp237 | RB | 1 Buah |
| | | ➤ Canon | RB | 1 Buah |
| 11 | Laptop | ➤ Asus Core i3 | B | 5 Buah |
| 12 | Telpon | | RB | 1 unit |
| 13 | Lemari Es | | B | 1 unit |
| 14 | Mesin Ketik | Sedang | RB | 1 buah |

| | | | | |
|----|-------------|----------------|---------|--------------------|
| 15 | Helm Dalmas | | RB B | 29 Buah 30 Buah |
| 16 | Tameng | Fiber | RB B | 10 Buah 30 Buah |
| 17 | Tongkat T | Karet Rotan | RB B | 15 Buah 30 Buah |
| 18 | Ac | | B | 3 Unit |
| 19 | Televisi | Tabung | RB | 2 unit |
| | | | | |

Tabel 1.9
KARTU INVENTARIS BARANG

| No. | Kode Barang | Jenis Barang / Nama Barang | Nomor Register | Merk/ Type | Ukuran/ CC | Bahan | Tahun Pembelian | Nomor | | | | | Asal usul | Harga (ribuan Rp) | Keterangan |
|-----|----------------------|--|-------------------|--|------------|----------------------|-----------------|--------|--------------------|----------------|------------|------------|-----------------|-------------------|--|
| | | | | | | | | Pabrik | Rangka | Mesin | Polisi | BPKB | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 1.3.2.05.002.005.009 | Tabung Gas | 000382 | - / - | | Besi | 1982 | | | | | | Pembelian | 600,00 | Tabung Gas |
| 1 | 1.3.2.01.003.012.017 | Tangga Tali Palaka | 000001 | - | | | 2006 | | | | | | Pembelian | 390,00 | Tali Induk Bendera |
| 2 | 1.3.2.05.002.006.033 | Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara) | 000222 | - / - | | | 2006 | | | | | | Pembelian | 1.170,00 | Petaia Tali Pembantu |
| 3 | 1.3.2.09.002.001.011 | Tenda | 000494 | - | | Tali Kain | 2006 | | | | | | Pembelian | 500,00 | Tenda Kompi |
| 4 | 1.3.2.15.003.002.005 | | 000218 s/d 000219 | - / - | | | 2006 | | | | | | Pembelian | 17.940,00 | |
| 1 | 1.3.2.09.004.002.028 | Tameng Tameng | 000252 s/d 000279 | - / - | | Piber Piber | 2007 | | | | | | Pembelian | 17.584,00 | Tameng Tameng Baju |
| 2 | 1.3.2.09.004.002.028 | alat dalmas/alat dakhura lainnya (dst) | 000369 s/d 000370 | - / - | | | 2007 | | | | | | Pembelian | 1.256,00 | Dalmas |
| 3 | 1.3.2.09.004.002.036 | | 000280 s/d 000309 | - / - | | | 2007 | | | | | | Pembelian | 37.680,00 | |
| 1 | 1.3.2.05.003.007.007 | Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis | 000454 s/d 000455 | - / - | | Besi | 2008 | | | | | | Pembelian | 3.160,00 | Lemari Arsip |
| 1 | 1.3.2.05.001.004.002 | Lemari Kayu Lemari Sorok Meja | 000169 | - / - | | Plastik Kayu | 2009 | | | | | | Pembelian | 2.500,00 | Lemari |
| 2 | 1.3.2.05.001.004.026 | Komputer Alat Dapur lainnya | 000457 | - | | Plastik | 2009 | | | | | | Pembelian | 700,00 | Lemari BoxFile Meja |
| 3 | 1.3.2.05.002.004.039 | alat-alat sandi lainnya (dst) | 000217 | - / - Mykolo / Mykolo | | | 2009 | | | | | | Pembelian | 1.750,00 | Komputer Dispenser |
| 4 | 1.3.2.05.002.005.026 | | 000482 | - / - | | | 2009 | | | | | | Pembelian | 350,00 | Tanda Heli Ved |
| 5 | 1.3.2.06.002.007.020 | | 000373 | - / - | | | 2009 | | | | | | Pembelian | 750,00 | |
| 1 | 1.3.2.05.002.004.001 | Lemari Es | 000375 | Panasinic / | | Besi | 2010 | | | | | | Pembelian | 1.500,00 | Kulkas AC |
| 2 | 1.3.2.05.002.004.004 | A.C. Split | 000376 s/d 000377 | Panasinic / | | Serbuk Kayu | 2010 | | | | | | Pembelian | 8.000,00 | Lemari Arsip |
| 3 | 1.3.2.05.003.007.007 | Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis | 000459 | Panasinic / | | | 2010 | | | | | | Pembelian | 1.000,00 | |
| 1 | 1.3.2.02.001.001.003 | Station Wagon | 000001 | / Toyota | 4009 | | 2011 | | | | DC9031C | | PEMBELIAN | 292.863,50 | Dikuasai pihak lain - |
| 2 | 1.3.2.05.001.001.001 | Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inc) | 000161 | Olinetti / Olinetti | | | 2011 | | | | | | Pembelian | 2.000,00 | Wonomulyo Mesin Ketik |
| 3 | 1.3.2.05.002.006.002 | | 000385 | Sharp / Sharp | | | 2011 | | | | | | Pembelian | 2.000,00 | Televisi Komputer PC |
| 4 | 1.3.2.10.001.002.001 | Televisi P.C Unit | 000484 | Core i3 / Core i3 | | | 2011 | | | | | | Pembelian | 5.000,00 | |
| 1 | 1.3.2.05.002.001.008 | Meja Rapat | 000175 s/d 000176 | -Meja Sidang / | | | 2012 | | | | | | Pembelian | 1.200,00 | Meja Rapat AC |
| 2 | 1.3.2.05.002.004.004 | A.C. Split | 000378 s/d 000379 | -Meja Sidang | | | 2012 | | | | | | Pembelian | 10.000,00 | Power supply |
| 3 | 1.3.2.05.002.006.018 | Unit Power Supply | 000001 | Air Conditioning | | | 2012 | | | | | | Pembelian | 1.800,00 | Kabel RG |
| 4 | 1.3.2.05.002.006.077 | Alat Rumah Tangga Lain-lain Kursi | 000413 | Unit / Air | | | 2012 | | | | | | Pembelian | 450,00 | Kursi Kerja Pejabat |
| 5 | 1.3.2.05.003.003.006 | Kerja Pejabat Eselon IV | 000454 | Conditioning Unit | | | 2012 | | | | | | Pembelian Hibah | 1.700,00 | Eselon IV |
| 6 | 1.3.2.05.003.003.009 | Kursi Kerja Pejabat lainnya Ali Band | 000200 s/d 000206 | RT-VC RG | 40 Ampere | Besi kawat besi kayu | 2012 | | | | | | Pembelian | 2.800,00 | Kursi Kerja Ali band |
| 7 | 1.3.2.06.003.023.021 | Receiver | 000001 | - / - | | | 2012 | | | | | | Pembelian | 4.780,00 | Meja Kerja |
| 8 | 1.3.2.08.001.056.081 | Meja Kerja | 000485 s/d 000491 | -Kursi Kerja / -Kursi Kerja Alinco Meja Kerja / Meja Kerja | | | 2012 | | | | | | Pembelian | 5.250,00 | |
| 1 | 1.3.2.05.002.001.002 | Meja Kerja Kayu Kursi Putar Handy Cam | 000429 s/d 000438 | - | | | 2013 | | | | | | Pembelian | 7.900,00 | Meja Kerja Kursi Putar Handy Cam |
| 2 | 1.3.2.05.002.001.022 | | 000189 | - | | | 2013 | | | | | | Pembelian | 750,00 | Handy Cam |
| 3 | 1.3.2.05.002.006.048 | Kursi Kerja Pejabat Eselon III Kursi | 000390 | - | | | 2013 | | | | | | Pembelian | 4.875,00 | Kursi Kerja Eselon 3 |
| 4 | 1.3.2.05.003.003.005 | Kerja Pejabat Eselon IV Kursi Kerja | 000449 | - | | | 2013 | | | | | | Pembelian | 3.000,00 | Kursi Kerja Eselon 4 |
| 5 | 1.3.2.05.003.003.006 | Pejabat lainnya Handy Talky (HT) | 000450 s/d 000453 | - | | | 2013 | | | | | | Pembelian | 8.000,00 | Kursi Kerja Handy Talky |
| 6 | 1.3.2.05.003.003.009 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 000439 s/d 000448 | futura | | | 2013 | | | | | | Pembelian | 5.500,00 | Printer |
| 7 | 1.3.2.06.002.001.006 | | 000471 | - | | | 2013 | | | | | | Pembelian | 2.875,00 | |
| 8 | 1.3.2.10.002.003.003 | | 000426 | - | | | 2013 | | | | | | Pembelian | 800,00 | |
| 1 | 1.3.2.02.001.004.001 | Sepeda Motor | 000133 | - | | Besi piber piber | 2014 | | MFFC1255FEK0034 91 | 164FPLZD004449 | DC 6834 CY | L-02142532 | Pembelian | 23.000,00 | Motor Trail Double |
| 2 | 1.3.2.02.001.004.001 | Sepeda Motor | 000465 | Monstrac / MTR | | | 2014 | | | | | | Pembelian | 23.000,00 | Pemakaian Motor Trail |
| 3 | 1.3.2.03.002.003.004 | perkakas bengkel service lainnya (dst) | 000135 | 200X | | | 2014 | | | | | | Pembelian | 500,00 | Monstrac |
| 4 | 1.3.2.05.002.006.012 | Wireless Megaphone Lighting Equipment | 000386 | - | | | 2014 | | | | | | Pembelian | 5.000,00 | Tripot Handy Cam |
| 5 | 1.3.2.05.002.006.013 | | 000387 | - | | | 2014 | | | | | | Pembelian | 1.000,00 | Wireless Microphone |
| 6 | 1.3.2.08.008.015.005 | | 000497 | - | | | 2014 | | | | | | Pembelian | 500,00 | Megaphone TOA Vidio Lighting Handy Cam |

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Polman Tahun 2021

15

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|---|-------------------|--|--------------------|----------------------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------|-------------|-----------|------------|---|
| 1 | 1.3.2.02.001.001.002 | Jeep | 000001 | Toyota - Hilux | 2500 | Besi | 2015 | 731616000-KDR-00 | MROF022G7E0788 | 2KD-S390315 | DC 8010 C | | Pembelian | 390.900,00 | Plat DC 45 C Motor |
| 2 | 1.3.2.02.001.004.001 | Sepeda Motor Kursi Biasa | 000134 | - | - | - | 2015 | 0007020 | 462 | | | | Pembelian | 17.948,60 | Kursi Kerja fatura |
| 3 | 1.3.2.05.002.001.033 | Meja Kerja Pejabat Eselon IV Lap Top | 000207 s/d 000216 | futura / futura | - | - | 2015 | | | | | | Pembelian | 5.000,00 | Meja kerja 1 biro |
| 4 | 1.3.2.05.003.001.006 | | 000427 s/d 000428 | - | - | - | 2015 | | | | | | Pembelian | 2.000,00 | Laptop asus slim 14 |
| 5 | 1.3.2.10.001.002.002 | | 000420 | - | - | - | 2015 | | | | | | Pembelian | 5.000,00 | |
| 1 | 1.3.2.02.001.004.001 | Sepeda Motor Meja Kerja Kayu | 000135 | Honda Scoopy | 108 CC | Besi | 2016 | | MH1JFW114GK427 | JFW1E1435739 | DC 6981 CW | M-10563348R | Pembelian | 18.130,00 | Sepeda Motor |
| 2 | 1.3.2.05.002.001.002 | Kursi Kerja Pejabat Eselon III | 000439 s/d 000440 | Active | 1 Biro | Serbuk Kayu | 2016 | | 400 | | | | Pembelian | 3.400,00 | Meja Kerja |
| 3 | 1.3.2.05.003.003.005 | P.C Unit Lap Top Lap Top Hard Disk | 000450 s/d 000451 | Front Line Lenovo | 14" | Besi/Gab us | 2016 | | | | | | Pembelian | 5.000,00 | Kursi Kerja Eselon |
| 4 | 1.3.2.10.001.002.001 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 000414 | Asus / Core i5 | 14" | Fiber Fiber | 2016 | | | | | | Pembelian | 7.000,00 | Komputer PC Laptop |
| 5 | 1.3.2.10.001.002.002 | | 000422 | Asus / Core i3 | 14" | Fiber Fiber | 2016 | | | | | | Pembelian | 8.000,00 | Laptop |
| 6 | 1.3.2.10.001.002.002 | | 000423 | TOSHIBA / 1 TB | | Fiber | 2016 | | | | | | Pembelian | 7.000,00 | Harddisk Eksternal |
| 7 | 1.3.2.10.002.001.012 | | 000001 | Canon / IP2770 | | | 2016 | | | | | | Pembelian | 1.000,00 | |
| 8 | 1.3.2.10.002.003.003 | | 000001 s/d 000002 | | | | 2016 | | | | | | Pembelian | 2.000,00 | |
| 1 | 1.3.2.02.001.004.001 | Sepeda Motor | 000466 | HONDA / | 124 CC | BENSIN | 2017 | | MH1JFU110HK879 | JFU1E1882051 | DC 6874 CU | M-04040247R | Pembelian | 19.430,00 | Sepeda Motor Matic |
| 2 | 1.3.2.10.002.003.003 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 000004 | E1F02N11M2 A/T. | | | 2017 | | 060 | | | | Pembelian | 3.250,00 | Vario 125 |
| 3 | 1.3.2.10.002.003.003 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 000005 | MATIC epson Canon / IP2770 | | | 2017 | | | | | | Pembelian | 750,00 | Printer Epson Printer canon |
| 1 | 1.3.2.08.004.004.008 | recorder display lainnya (dst) | 000497 | Epson / L-360 | | Fiber Fiber | 2018 | | | | | | Pembelian | 2.700,00 | Ruang Sekertariat |
| 2 | 1.3.2.08.004.004.008 | recorder display lainnya (dst) | 000498 | Epson / L-405 asus | | fiber | 2018 | | | | | | Pembelian | 3.300,00 | Ruang Sekertariat |
| 3 | 1.3.2.10.001.002.002 | Lap Top | 000424 | ASUS | | Fiber | 2018 | | | | | | Pembelian | 9.500,00 | dikuasai Oleh Pengurus |
| 4 | 1.3.2.10.001.002.002 | Lap Top | 000425 | | 14 inci 14 Inci | | 2018 | | | | | | Pembelian | 9.500,00 | Barang Darwis,S.IP dikuasai oleh Pembuat SPP /SPM Jaswat Yusuf, S.IP |
| 1 | 1.3.2.02.001.003.002 | Pick Up | 000001 | Toyota / | 2494 cc | Besi fiber | 2019 | | MROES8B84K0064 | 2KD-D001604 | DC 8089 CY | O-06950871R | Pembelian | 268.551,00 | Kendaraan operasional |
| 2 | 1.3.2.05.001.005.012 | Mesin Absensi | 000166 | Hilux Pick | 1 PK/ Puth | Fiber Fiber | 2019 | | 978 | | | | Pembelian | 4.250,00 | di Depan Ruang Kasat |
| 3 | 1.3.2.05.002.004.005 | Portable Air Conditioner (Alat Pendingin) | 000001 s/d 000002 | UP 2,5 DSI Solution / | 14 Inci 14 Inci | Serbuk Kayu Fiber Fiber | 2019 2019 | | | | | | Pembelian | 9.790,00 | PoiPP |
| 4 | 1.3.2.05.002.006.021 | Camera Video | 000001 | X302-5 | | Fiber Fiber | 2019 | | | | | | Pembelian | 8.024,00 | Ruang Sekertariat |
| 5 | 1.3.2.05.003.001.005 | Meja Kerja Pejabat Eselon III Layer | 000001 | Panasonic | | Fiber | 2019 | | | | | | Pembelian | 2.000,00 | Digunakan Oleh |
| 6 | 1.3.2.06.001.002.105 | Film/Projector | 000001 | Canon / | 1300 D | | 2019 | | | | | | Pembelian | 7.000,00 | Hasanuddin S.IP |
| 7 | 1.3.2.06.002.001.006 | Handy Talky (HT) Lap Top | 000478 s/d 000481 | | | | 2019 | | | | | | Pembelian | 6.000,00 | Humas Satpol PP |
| 8 | 1.3.2.10.001.002.002 | Lap Top | 000426 | 1300 D | | | 2019 | | | | | | Pembelian | 5.500,00 | Dipakai oleh Kasi |
| 9 | 1.3.2.10.001.002.002 | Lap Top | 000427 | actv / 1 Biro Epson Boafeng ASUS / X441 MA / intel inside ASUS / X441 MA / Intel inside | | | 2019 | | | | | | Pembelian | 5.500,00 | Penyidikan Yusuf, S.Sos (Warna Merah Maron) Digunakan Oleh Nur Syafaat S.Sos Kasi Teknis Fungsional (warna Silver) |
| 1 | 1.3.2.05.001.004.002 | Lemari Kayu | 000170 | - | 0 Cm x 170 C | Kayu | 2020 | | | | | | Pembelian | 2.227,90 | Lemari Arsip |
| 2 | 1.3.2.05.002.001.030 | Kursi Rapat | 000001 s/d 000002 | Futura | | Besi | 2020 | | | | | | Pembelian | 717,00 | Satpol PP |
| 3 | 1.3.2.05.002.005.015 | Rak Piring Aluminium | 000001 | - | | Besi/ aluminium | 2020 | | | | | | Pembelian | 500,00 | Kursi Staf |
| 4 | 1.3.2.05.002.006.048 | Handy Cam | 000392 | Sony / MC | | Fiber | 2020 | | | | | | Pembelian | 15.750,00 | Rak Piring |
| 5 | 1.3.2.05.002.006.059 | Gordyn/Kray | 000001 | - | 30 Meter | Kain | 2020 | | | | | | Pembelian | 6.000,00 | di Gunakan Kantor untuk Keperluan Dokumentasi |
| 6 | 1.3.2.05.003.003.004 | Kursi Kerja Pejabat Eselon II | 000001 | Frontline / Hitam | | Besi dab Spon | 2020 | | | | | | Pembelian | 3.300,00 | Ruangan Sekertariat dan Kepala SatpolPP |
| 7 | 1.3.2.06.002.001.006 | Handy Talky (HT) | 000482 s/d 000485 | Alinco | | Fiber | 2020 | | | | | | Pembelian | 10.000,00 | diGunakan Oleh kepala satuan Polisi Pamong Praja Drs. Aco Djalaluddin AM, Ma |

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Polman Tahun 2021

16

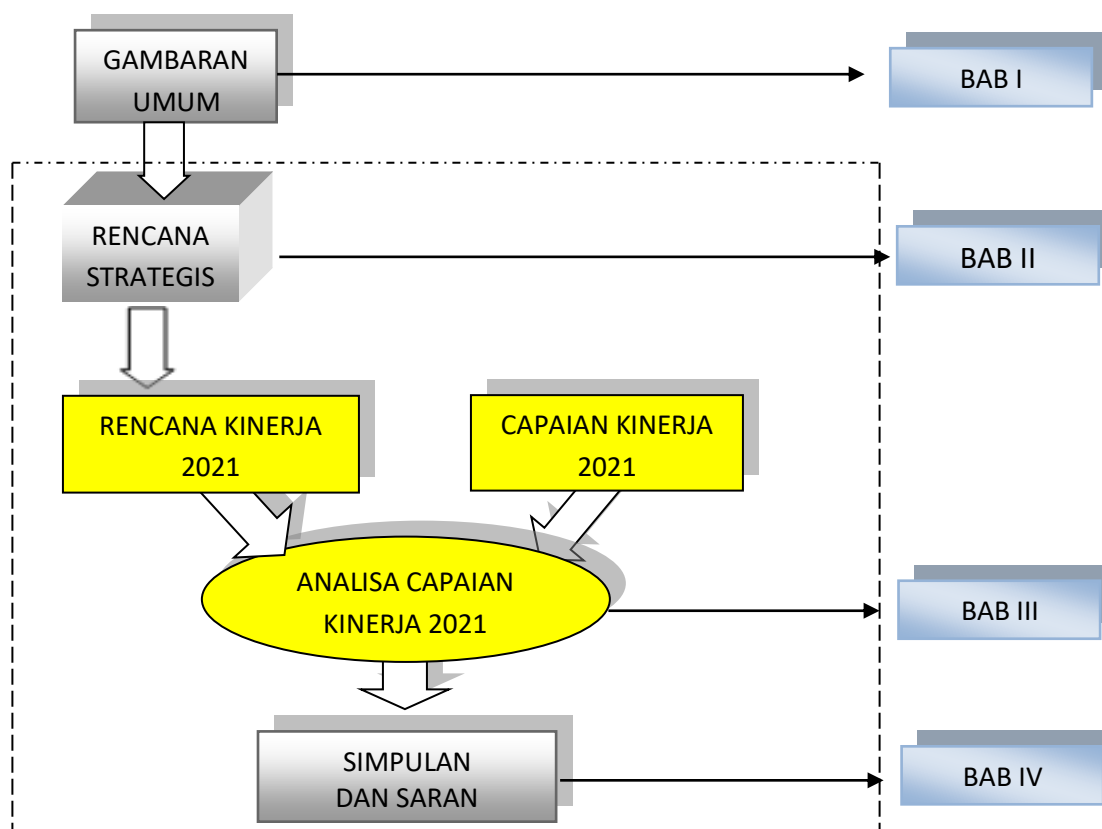
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------|---|-------------------|--|---------------------|---------------|------------------------|------|----------------|-------------|------------|--|--|-----------|-----------|--|---|
| 8 | 1.3.2.06.002.001.006 | Handy Talky (HT) | 000486 s/d 000489 | | Rit RTG | RTG ic | Fiber dan aluminiu m | 2020 | | | | | | Pembelian | 16.000,00 | Pesawat Radio dan antena | |
| 9 | 1.3.2.08.001.013.081 | TV Monitor | 000001 | | LG / Layer Datar | 55 Ind | Fiber | 2020 | | | | | | Pembelian | 8.000,00 | Di Ruangan Sekertariat | |
| 10 | 1.3.2.08.001.013.081 | TV Monitor | 000002 | | LG / Layer Datar | 32 Ind | Fiber | 2020 | | | | | | Pembelian | 3.500,00 | Digunakan di Ruangank Kepala Kantor SatpolPP | |
| 11 | 1.3.2.08.001.041.192 | Personal Computer | 000001 | | Lenovo / 330-20 AST | 16 Ind | Fiber | 2020 | | | | | | Pembelian | 6.823,80 | Digunakan oleh Warsiman S.Sos | |
| 12 | 1.3.2.08.001.041.192 | Personal Computer | 000002 | | Lenovo / 330-20 AST | 16 Ind | Fiber | 2020 | | | | | | Pembelian | 6.823,80 | Digunakan Oleh Imran S.IP | |
| 13 | 1.3.2.10.001.002.002 | Lap Top | 000428 | | Asus / Core3 | 14 Ind | Fiber | 2020 | | | | | | Pembelian | 6.471,00 | Di Gunakan oleh Muliady S.Sos | |
| 14 | 1.3.2.10.001.002.002 | Lap Top | 000429 | | Asus / Core3 | 14 Ind | Fiber | 2020 | | | | | | Pembelian | 6.471,00 | Digunakan Oleh Harniaty SE | |
| 15 | 1.3.2.10.001.002.002 | Lap Top (Peralatan Personal Komputer) | 000430 | | Asus / Core3 | 14 Ind | Fiber | 2020 | | | | | | Pembelian | 6.471,00 | digunakan Oleh arif | |
| 16 | 1.3.2.10.002.003.003 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 000427 | | Epson / L5190 | Hitam | Fiber | 2020 | | | | | | Pembelian | 4.217,20 | Jihad Pratama alam | |
| 17 | 1.3.2.10.002.003.003 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 000428 | | Epson / L 120 | Hitam | Fiber | 2020 | | | | | | Pembelian | 1.660,40 | Digunakan di ruangan Sekertariat satpolPP diGunakan Di Ruangang Perundang Undangan Meja Imran S.IP | |
| 1 | 1.3.2.02.001.004.001 | Sepeda Motor | 000467 | | Vario / 150 | | Besi kayu | 2021 | MH1KCS111FK061 | 51E-1061593 | DC 6870 CW | | | Pembelian | 25.890,00 | digunakan oleh MAJID | |
| 2 | 1.3.2.05.002.001.024 | Meja 1/2 Biro | 000190 s/d 000191 | | cc | | besi | 2021 | 286 | | | | | Pembelian | 1.648,00 | SYAHRIR,S.Sos / | |
| 3 | 1.3.2.05.002.005.002 | Kompur Gas (Alat Dapur) | 000382 | | rinnai futura | | besi dan kain (busa) | 2021 | | | | | | Pembelian | 332,00 | kasubag Perencanaan dan pelaporan | |
| 4 | 1.3.2.05.003.003.008 | Kursi Kerja Pegawai Non Struktural | 000001 s/d 000004 | | - | | kayu | 2021 | | | | | | Pembelian | 2.200,00 | digunakan oleh | |
| 5 | 1.3.2.05.003.007.007 | Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis | 000460 | | - | 18 inchi | besi dan kayu | 2021 | | | | | | Pembelian | 1.800,00 | digunakan oleh | |
| 6 | 1.3.2.05.003.007.007 | Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis | 000461 | | - LG | 14 inchi | besi kayu | 2021 | | | | | | Pembelian | 3.000,00 | kasubag. keuangan dan verifikasi slamet S.Sos | |
| 7 | 1.3.2.05.003.007.007 | Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis | 000462 | | lenovo / abu | inchi/ abu- a | fiber fiber | 2021 | | | | | | Pembelian | 1.800,00 | digunakan oleh kas | |
| 8 | 1.3.2.10.001.002.001 | P.C Unit Lap Top | 000485 | | - abu | | fiber | 2021 | | | | | | Pembelian | 5.463,70 | digunakan oleh kas | |
| 9 | 1.3.2.10.001.002.002 | Lap Top | 000431 | | lenovo | | fiber | 2021 | | | | | | Pembelian | 11.456,70 | fungsiional modh. Nur | |
| 10 | 1.3.2.10.001.002.002 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 000432 | | canon 1010 | | fiber | 2021 | | | | | | Pembelian | 11.456,70 | Safaat, S.Sos | |
| 11 | 1.3.2.10.002.003.003 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 000429 s/d 000430 | | | | | 2021 | | | | | | Pembelian | 3.320,80 | | |
| 1 | 1.3.2.05.002.007.017 | Alat Pemadam Kebakaran lainnya | 000001 | | / Honda | | | 2010 | | | | | | PEMBELIAN | | 1.000,00 | UPTD Pemadam |
| 1 | 1.3.2.05.002.005.011 | Treng Air/Tandon Air Pompa Kebakaran/Portable | 000001 | | / - | | | 2011 | | | | | | PEMBELIAN | | 21.000,00 | Pengadaan Gorden |
| 2 | 1.3.2.05.002.007.002 | Kebakaran/Portable | 000001 | | / - | | | 2011 | | | | | | PEMBELIAN | | 15.000,00 | Mesin Pompa Aicom/UPTD Pemadam |
| 1 | 1.3.2.08.001.010.014 | Nozle Tester | 000001 | | / - | | | 2012 | | | | | | PEMBELIAN | | 1.500,00 | Nozzle (Monitor |
| 2 | 1.3.2.08.001.010.014 | Nozle Tester | 000002 | | / - | | | 2012 | | | | | | PEMBELIAN | | 4.000,00 | Penembak Air)/UPTD Pemadam Nozzle (Cabang 2)/UPTD Pemadam |
| 1 | 1.3.2.05.002.007.017 | Alat Pemadam Kebakaran lainnya | 000012 s/d 000013 | | - | | | 2013 | | | | | | PEMBELIAN | | 20.000,00 | Selang Pemadam Kebakaran/UPTD Pemadam Kamera Digital |
| 2 | 1.3.2.06.001.002.164 | Alat Studio Video Lainnya | 000001 | | / - | | | 2013 | | | | | | PEMBELIAN | | 3.000,00 | Pemadam Kamera Digital |
| 1 | 1.3.2.05.002.005.002 | Kompur Gas (Alat Dapur) | 000059 | | Rinnai / Rinnai | | | 2015 | | | | | | PEMBELIAN | | 500,00 | Kompur Gas/Minyak/UPT D Pemadam Perkalas Perbenglelan |
| 2 | 1.3.2.08.001.042.002 | Perkalas Modem | 000001 s/d 000002 | | - | | | 2015 | | | | | | PEMBELIAN | | 3.000,00 | Modem Wireless/UPTD Pemadam |
| 3 | 1.3.2.10.002.004.004 | Perkalas Modem | 000001 | | Bolt / Bolt | | | 2015 | | | | | | PEMBELIAN | | 500,00 | Modem Wireless/UPTD Pemadam |

1.2.2. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya laporan akuntabilitas kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar selama tahun 2021, Capaian kinerja tersebut diperbandingkan dengan rencana kerja 2020 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kerja ini akan dimungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kerja bagi perbaikan kinerja dimasa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian laporan akuntabilitas kinerja tahun 2021 dapat di ilustrasikan dalam bagan berikut :

Grafik 1

Sistematika Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021



Uraian singkat masing – masing Bab adalah sebagai berikut:

- BAB I Gambaran umum, menurut latar belakang penulisan LAKIP, Dasar Hukum Penulisan Lakip, Maksud dan Tujuan penyusunan LAKIP, Kondisi Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Sistimatika Pelaporan LAKIP Tahun 2021
- BAB II Rencana Strategis ,menjelaskan Visi dan Misi, tujuan dan Sasaran serta Indikator Kinerja utama, Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2021, Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2021.
- BAB III Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan , Analisis Pencapaian Kinerja dikaitkan dengan pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2021, Uraian Informasi terkait akutabilitas Keuangan Satuan Kerja.
- BAB IV Penutup penjelasan kesimpulan dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan tahun 2021 dan menguraikan saran yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa datang.

BAB II



2.1. RENCANA STRATEGI

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah mempunyai rencana strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan agar tercipta Ketentraman dan Ketertiban Umum serta penegakan atas pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Untuk itu diharapkan mempunyai andil yang cukup besar dalam memelihara Keamanan dan Ketertiban di Daerah dengan bersifat proaktif dan ansipatif pada terwujudnya kesadaran masyarakat. Tuntutan atas kinerja merupakan suatu masalah serius yang dihadapi mengingat kualitas sumber daya manusia belum optimal untuk menyelesaikan segala permasalahan yang begitu kompleks dalam hal Penegakan Peraturan Daerah. Rencana Strategis tersebut disusun dengan memperhatikan berbagai faktor yang ada pada lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan konsep ini tidak bersifat statis melainkan dapat diubah sesuai dengan dinamika dan perubahan lingkungan strategis.

Rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja ini dimaksudkan untuk memberikan arah penyelenggaraan pembangunan selama 5 (lima) tahun dimulai pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 dengan maksud menyatukan berbagai gagasan strategi dan memiliki orientasi terhadap masa depan di dukung dengan adanya Visi, Misi, Tujuan dan sasaran organisasi serta indikator target Kinerja.

2.1.1 Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja

Adapun Visi, Misi, organisasi dan cara mencapai tujuan dan sasaran, serta sasaran strategis dan kebijakan adalah :

Visi



Terwujudnya Masyarakat Sadar Hukum Yang Berkeadilan
melalui Penegakan Perundang-Undangan Dan Peraturan
Daerah

Misi:

Untuk Mewujudkan Visi tersebut maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar melalui langkah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Penegakan Peraturan Daerah
2. Peningkatan Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
3. Penyiapan Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja Yang Profesional dan Berintegritas Tinggi
4. Peningkatan Kesiapsiagaan Perlindungan Masyarakat
5. Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

2.1.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

2.1.2.1 Tujuan

Tujuan Sasaran Strategis Sebagai penjabaran atau penerapan misi tersebut di atas, maka ditetapkan tujuan yang ingin dicapai untuk Meningkatkan ketertiban, ketentraman dan keindahan di lingkungan masyarakat dijabarkan pada 5 (Lima) tujuan antara lain :

1. Terwujudnya Penegakan Peraturan daerah yang berkualitas
2. Terwujudnya keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat

3. Tersedianya Satuan Polisi Pamong Praja yang Profesional dan berintegritas tinggi
4. Tersedianya Tenaga Satuan Perlindungan Masyarakat yang memiliki kualifikasi kemampuan dasar dan teknis memadai
5. Terwujudnya Kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

5.1.2.2 Sasaran

Untuk mencapai tujuan Meningkatkan Ketertiban ,Ketentraman, Keindahan dilingkup masyarakat maka ditetapkan sasaran berupa Meningkatnya ketertiban, ketentraman dan keindahan di lingkungan masyarakat dijabarkan pada 5 (Lima) Sasaran antara lain :

1. Sasaran Meningkatnya Kualitas kepatuhan terhadap Peraturan Daerah dengan target capaian indikator Persentase Pelanggaran Perda yang tertangani
2. Sasaran Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan target Capaian Indikator Persentase Gangguan ketertiban, keamanan dan ketentraman yang ditindaklanjuti
3. Sasaran Meningkatnya kualitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dengan target Capaian indikator Persentase SDM Satuan Polisi Pamong Praja yang telah memenuhi kualifikasi dasar dan tehnis Polisi Pamong Praja
4. Sasaran Meningkatnya kesiap-siagaan perlindungan masyarakat dengan Target Capaian indikator Rasio anggota linmas di tingkat dusun
5. Sasaran Meningkatnya Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran dengan target capaian indikator Cakupan Wilayah Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran.

Adapun visi, misi ,tujuan dan sasaran dapat kita lihat ditabel berikut ini :

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--|--|---|--------|--|----|-----|-----|-----|-----|
| | | Sasaran : | | | | | | | | | |
| | | 3.1.1. | Meningkatnya Kualitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja | | | | | | | | |
| | | | | Presentase SDM Satuan Polisi Pamong Praja Yang Telah Memenuhi kualifikasi Dasar dan Tehnis Polisi Pamong Praja | Persen | | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Peningkatan Kesiapsiagaan Perlindungan Masyarakat | | | | | | | | | | |
| | Tujuan : | | | | | | | | | | |
| | 4.1 | Tersedianya Tenaga Satuan Perlindungan Masyarakat Yang Memiliki Kualifikasi Kemampuan Dasar dan Tehnis Memadai | | | | | | | | | |
| | | Sasaran : | | | | | | | | | |
| | | 4.1.1 | Meningkatnya Kesiapsiagaan Perlindungan Masyarakat | | | | | | | | |
| | | | | Persentase Kecamatan yang memilki tenaga Satlinmas yang mempunyai kualifikasi kemampuan dasar dan tehnis yang memadai | Persen | | 81 | 88 | 88 | 100 | 100 |
| 5 | Peningkatan Kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran | | | | | | | | | | |
| | Tujuan : | | | | | | | | | | |
| | 4.1 | Terwujudnya Kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran | | | | | | | | | |
| | | Sasaran : | | | | | | | | | |
| | | 4.1.1 | Meningkatnya Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran | | | | | | | | |
| | | | | Persentase kecamatan kesiapsiagaan bahaya bencana kebakaran | Persen | | 88 | 88 | 94 | 94 | 100 |

2.2. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2021

Penetapan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari delapan Sasaran Strategis dan delapan Indikator Kinerja Tiga Program dan sepuluh kegiatan Tiga Puluh Tujuh Sub Kegiatan dengan Total Anggaran Rp16.157.166.504 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Sasaran dan Indikator Kinerja serta Target Kinerja

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | Capaian 2020 | TARGET 2021 |
|-----|--|---|-----------------|----------------|
| (1) | (2) | (3) | | (4) |
| 1. | Meningkatnya Kualitas penanganan kasus pelanggaran Peraturan Daerah | Persentase Kasus Pelanggaran Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti | 100% | 100% |
| 2. | Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat | Persentase Gangguan keamanan ,Ketertiban dan ketentraman yang ditindaklanjuti | 100% | 100 % |
| 3. | Meningkatnya kualitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja | Persentase Satpol PP yang memiliki kualifikasi : - Dasar - Tehnis | 66 % 2 % | 74 % 3% |
| 4. | Meningkatnya kesiap-siagaan perlindungan masyarakat | Persentase Kecamatan yang memilki tenaga Satlinmas yang mempunyai kualifikasi kemampuan dasar dan tehnis yang memadai | 81 % | 88 % |
| 5. | Meningkatnya Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran | Persentase kecamatan kesiapsiagaan bahaya bencana kebakaran | 88 % | 88 % |
| 6. | Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran | Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder | Baik | Baik |
| 7. | Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah | Predikat SAKIP Perangkat Daerah | B | B |
| 8 | Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah | Opini Pengelolaan Keuangan | WTP | WTP |

1. Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas penanganan kasus pelanggaran Peraturan Daerah terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja yaitu Persentase Kasus Pelanggaran Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti target 100 %, dengan rumus capaian adalah :

$$\frac{\text{Persentase pelanggaran Peraturan daerah yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah pelanggaran Peraturan daerah yang ditindaklanjuti}} = \frac{\text{Jumlah pelanggaran Peraturan daerah yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah pelanggaran Peraturan daerah}} = \times 100\%$$

Sasaran ini dilaksanakan oleh Bidang Penegakan Peraturan Perundang undangan tergabung dalam satu Program yaitu Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum dengan kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten /Kota dan Peraturan Bupati/Walikota Total Pagu Kegiatan Rp57.779.922 terdiri atas Sub Kegiatan :

1. Sosialisasi Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati /Walikota anggaran Rp. 19.745.600
 2. Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota anggaran Rp. 10.145.247,-
 3. Penanganan Peraturan daerah dan peraturan Bupati/Walikota anggaran Rp 27.889.075 .
2. Sasaran Strategis Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase Gangguan ketertiban, keamanan dan ketentraman yang ditindaklanjuti target capaian 100 % dengan rumus capaian target adalah :

$$\frac{\text{Persentase Gangguan Ketertiban keamanan dan ketentraman yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah gangguan ketertiban, keamanan, dan ketentraman masyarakat yang teridentifikasi oleh SATPOL PP}} = \frac{\text{Jumlah gangguan ketertiban, keamanan dan ketentraman yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah gangguan ketertiban, keamanan, dan ketentraman masyarakat yang teridentifikasi oleh SATPOL PP}} = \times 100\%$$

Sasaran dilaksanakan oleh Bidang Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat tergabung dalam satu Program yaitu Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum pada kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) daerah Kabupaten /Kota terdiri atas Sub Kegiatan :

1. Pencegahan Gangguan Ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, Pembinaan dan penyuluhan , Pelaksanaan Patroli ,Pengamanan dan Pengawasan Jumlah anggaran 15.851.908
 2. Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara melalui penertiban dan penaganan unjuk rasa dan kerusuhan massa Jumlah Anggaran Rp. 217.990.000,-
 3. Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam tehnik pencegahan dan penanganan Gangguan ketentraman dan ketertiban umum Jumlah Anggaran Rp. 9.994.850,-
3. Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu Presentase SDM Satuan Polisi Pamong Praja Yang Telah Memenuhi kualifikasi Dasar dan Tehnis Polisi Pamong Praja Target Kualifikasi dasar 74 % dan Tehnis 3% c dengan rumus capaian target adalah :

$$\begin{array}{l}
 \text{Persentase Satpol PP} \\
 \text{Yang Memiliki} \\
 \text{Kuyalifikasi Dasar Dan} \\
 \text{Tehnis}
 \end{array}
 = \frac{\text{Jumlah Satpol PP Yang Memiliki Kualifikasi Dasar} \\
 \text{Dan Tehnis}}{\text{Jumlah SATPOL PP}} = \text{X 100\%}$$

Sasaran ini dilaksanakan oleh Bidang Sumber Daya aparatur tergabung dalam satu Program yaitu Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum pada kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) daerah Kabupaten /Kota terdiri atas Sub Kegiatan :

1. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak asasi Manusia Jumlah anggaran Rp. 9.989.200
4. Sasaran Strategis Meningkatnya kesiap-siagaan perlindungan masyarakat terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase Kecamatan yang memilki tenaga Satlinmas yang mempunyai kualifikasi kemampuan dasar dan tehnis yang memadai taget 88% dengan rumus capaian target adalah :

$$\begin{array}{l}
 \text{Persentase} \\
 \text{Kecamatan yang} \\
 \text{memiliki tenaga}
 \end{array}
 = \frac{\text{Jumlah KecamatanYang Memiliki tenaga} \\
 \text{Satlinmas yang mempunyai Kuyalifikasi Dasar} \\
 \text{Dan Tehnis}}{\text{X 100\%}}$$

Satlinmas yang
 mempunyai kualifikasi
 kemampuan dasar
 dan tehnik

Jumlah Kecamatan

Sasaran ini dilaksanakan oleh Bidang Perlindungan Masyarakat tergabung dalam satu Program yaitu Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum pada kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) daerah Kabupaten /Kota terdiri atas Sub Kegiatan :

1. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum
 Jumlah anggaran Rp. 14.999.905.
 2. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/ kota Jumlah anggaran Rp. 15.765.200,-
5. Sasaran Strategis Meningkatnya Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase kecamatan kesiapsiagaan bahaya bencana kebakaran Target 88% dengan rumus capaian target adalah :

$$\frac{\text{Persentase Kecamatan kesiapsiagaan bahaya bencana kebakaran}}{\text{Jumlah Kecamatan Yang dijangkau kesiapsiagaan bahaya kebakaran}} = \frac{\text{Jumlah Kecamatan}}{\text{Jumlah Kecamatan}} \times 100\%$$

Sasaran ini dilaksanakan oleh UPTD Pemadam Kabakaran terdiri dari 1 Program yaitu Program Pencegahan , Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran pada kegiatan Pencegahan Pengendalian ,Pemadaman , Penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten /Kota terdiri atas Sub Kegiatan :

1. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam daerah Kabupaten kota Jumlah anggaran Rp. 4.098.730.608.
6. Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder target Predikat Baik

Sasaran ini tergabung dalam satu Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri atas 5 Kegiatan 20 Sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Anggaran Rp. 58.350.000 ,-
 - b. Sub Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Panilaian Kinerja Pegawai Rp. 5.999.900,-
2. Kegiatan : Administarsi Umum Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Rp. 1.131.000,-
 - b. Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp. 9.515.467
 - c. Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp. 24.812.000
 - d. Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Rp. 8.250.200
 - e. Sub Kegiatan : Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang undangan Rp. 4.440.000
 - f. Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp.144.372.500,-
3. Kegiatan : Pengadaan Barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan dinas Operasional atau lapangan Rp. 37.000.000
 - b. Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel Rp. 4.008.000
 - c. Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya Rp. 39.829.900
 - d. Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya Rp.4.980.000
4. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp.4.998.000
 - b. Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Rp. 6.126.960
 - c. Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp. 4.900.000
 - d. Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp. 1.945.318.000
5. Kegiatan : Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan Rp. 5.510.000
- b. Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan ,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan Rp. 40.291.600
- c. Sub Kegiatan : Pemeliharaan Mebel Rp. 3.985.000
- d. Sub Kegiatan : Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya Rp. 8.557.800

7. Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu Predikat SAKIP Perangkat Daerah dengan target Predikat B.

Sasaran ini tergabung dalam satu Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri atas 1 Kegiatan 4 Sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp. 6.421.200
 - b. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD Rp. 2.712.280,-
 - c. Sub Kegiatan :Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp. 4.495.000
 - d. Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp. 2.641.000,-

8. Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Perangkat Daerah terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu Opini Pengelolaan Keuangan dengan target WTP.

Sasaran ini tergabung dalam satu Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri atas 1 Kegiatan 3 Sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp. 9.333.016.504
 - b. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan akuntansi SKPD Rp. 1.781.000
 - c. Sub Kegiatan : Penyusunan Pelaporan dan analisis Prognosis Realisasi anggaran Rp. 2.621.600

Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 berdasarkan Eselon III dan Eselon IV :

1. Perjanjian Kinerja antar Kepala Bidang Perundang undangan dengan Seksi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | CAPAIAN 2020 | TARGET 2021 |
|-----|--|--|--------------|-------------|
| (1) | (2) | (3) | | (4) |
| 1. | Terlaksananya penyuluhan | Jumlah penyuluhan | 1 Kali | 1 Kali |
| 2. | Terlaksananya Pengawasan Tindak pelanggaran Peraturan Daerah | Jumlah Pelanggar perda yang dibina dan diawasi | - | 73 Kasus |

2. Perjanjian Kinerja antar Kepala Bidang Perundang undangan dengan Seksi Penyidikan dan Penyelidikan

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | CAPAIAN 2020 | TARGET 2021 |
|-----|---|--|--------------|-------------|
| (1) | (2) | (3) | | (4) |
| 1. | Terlaksananya Penyidikan dan Penindakan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah | Jumlah Pelanggaran Perda yang disidik dan ditindak | 53 Kasus | 79 Kasus |

3. Perjanjian Kinerja antar Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan Seksi Operasional dan Pengendalian

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----|---|----------------------------|---------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Terlaksananya Patroli diwilayah trantibum | Jumlah Pelaksanaan Patroli | 12 Kali |

4. Perjanjian Kinerja antar Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan Seksi Kerjasama

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----|--|--|---------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Terlaksananya Operasi Pekat Kerjasama TNI/ Polri | Jumlah Pelaksanaan Operasi Pekat Kerjasama TNI/ Polri | 1 Kali |
| 2. | Terlaksananya Patroli diwilayah trantibum | Jumlah Pelaksanaan Patroli | 12 Kali |
| 3. | Terlaksananya Pengamanan dan Penertiban | Jumlah Penanganan gangguan Keamanan dan Ketertiban dan Ketertiban Umum | 84 Kali |

5. Perjanjian Kinerja antar Kepala Bidang Sumber Daya aparatur dengan Seksi Pelatihan Dasar

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | CAPAIAN 2020 | TARGET 2021 |
|----|---|---|--------------|-------------|
| 1. | Terlaksananya Dikdas dan Peningkatan Kapsitas Satpol PP | 1. Jumlah anggota Satpol PP yang mengikuti Dikdas dan Peningkatan Kapasitas Satpol PP | 30 Orang | 30 Orang |

6. Perjanjian Kinerja antar Kepala Bidang Sumber Daya aparatur dengan Seksi Tehnis Fungsional

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | CAPAIAN 2020 | TARGET 2021 |
|----|---|--|--------------|-------------|
| 1. | Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional | Jumlah Pejabat Fungsional Satpol PP yang dinilai | - | 37 Orang |

7. Perjanjian Kinerja antar Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dengan Seksi Satlinmas

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | CAPAIAN 2019 | TARGET 2020 |
|-----|--------------------------------------|---|-----------------|----------------|
| (1) | (2) | (3) | | (4) |
| 1. | Terlaksananya kegiatan sadar trantib | Jumlah Pelaksanaan kegiatan sadar trantib | 1.Kali | 1. Kali |

8. Perjanjian Kinerja antar Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dengan Seksi Bina Potensi Masyarakat

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | CAPAIAN 2020 | TARGET 2021 |
|-----|--|--|-----------------|-------------|
| (1) | (2) | (3) | | (4) |
| 1. | Terlaksananya kegiatan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan | Jumlah Peserta Pelatihan Perlindungan Masyarakat | - | 20 Orang |

9. Perjanjian Kinerja antar Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dengan dengan UPTD Pemadam Kebakaran

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | CAPAIAN 2020 | TARGET 2021 |
|-----|---|---|-----------------|--------------|
| (1) | (2) | (3) | | (4) |
| 1. | Cakupan layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) | Jumlah Kecamatan yang mendapatkan layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) | 14 Kecamatan | 14 Kecamatan |

Berdasarkan RENSTRA Satpol PP Tahun 2019 – 2024 Sasaran Program dan Indikator Program dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3

| No | Program | Sasaran Program | Indikator Program (Outcomes) | Target Kinerja |
|----|---|--|---|----------------|
| 1 | Program Penegakan Peraturan Perundang Undangan | Meningkatnya Kualitas penanganan kasus pelanggaran Peraturan Daerah | Persentase Kasus Pelanggaran Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti | 100 |
| 2 | Program Pembinaan Ketertiban Umum | Meningkatnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat | Persentase Gangguan keamanan ,Ketertiban dan ketenteraman yang ditindaklanjuti | 100 |
| 3 | Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Polisi Pamong Praja | Meningkatnya kualitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja | Persentase Satpol PP yang memiliki kualifikasi : - Dasar - Tehnis | 74 |
| | | | | 3 |
| 4 | Program Peningkatan Kualitas Perlindungan Masyarakat | Meningkatnya kesiapsiagaan perlindungan masyarakat | Persentase Kecamatan yang memilki tenaga Satlinmas yang mempunyai kualifikasi kemampuan dasar dan tehnis yang memadai | 88 |
| 5 | Program Penanganan Bencana Kebakaran | Meningkatnya Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran | Persentase kecamatan kesiapsiagaan bahaya bencana kebakaran | 88 |
| 6 | Program Manajemen Perkantoran | Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran | Persentase tertib ketatausahaan kantor | 94 |
| | | | Persentase sarana prasarana kantor kondisi baik | 64 |
| | | | Persentase PNS Perangkat Daerah yang berkinerja baik | 66 |
| 7 | Program Penguatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan | Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah | Persentase Perencanaan Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu | 100 |
| | | | Persentase penganggaran Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu | 100 |
| | | | Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu | 100 |
| 8 | Program Peningkatan Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah | Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu | 100 |
| | | | Persentase Penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu | 100 |
| | | | Persentase penyampaian Laporan Aset sesuai standar dan tepat waktu | 100 |

BAB III



AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

3.1. AKUNTABILITAS KINERJA

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011. Kedua regulasi tersebut diatas sebagai landasan normative digunakan sebagai dasar acuan dalam mengukur untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kinerja sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja, penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan yang mengolah kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Pengukuran kinerja terdapat tahapan penetapan, pengumpulan data kinerja, dan cara pengukuran kinerja. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja yaitu data internal dan eksternal yang berasal dari luar instansi baik primer maupun data sekunder. Dalam pengukuran kinerja mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (Rencana Tingkat Capaian) dari masing – masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Sejalan dengan uraian tersebut, Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar diukur berdasarkan tingkat capaian kinerja sasaran, program / kegiatan serta indikator makro.

Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja dilakukan evaluasi dan analisa kinerja untuk hal tersebut dimaksudkan untuk mengetahui berhasil tidaknya sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

3.1.1. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi kerja, dilakukan analisa pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai tidaknya kinerja yang diharapkan. Untuk melihat capaian tersebut dapat kita lihat di bawah ini :

3.1.1.1. Capaian Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas penanganan kasus pelanggaran Peraturan Daerah

Indikator Kinerja 1 : Persentase Kasus Pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti

Pencapaian Penangan kasus pada Indikator 1, Pelanggaran Perda sebanyak 61 Kasus dan yang ditindaklanjuti adalah 57 Kasus atau 93,44 % sebanyak 4 Jenis Perda yang ditargetkan dan capaian realisasi kinerja 100% yaitu :

1. Perda Nomor 1 Tahun 2010 tentang ketertiban umum sebanyak 30 kasus dan telah ditindaklanjuti sebanyak 29 Kasus capaian kinerja 96%,
2. Perda Nomor 13 Tahun 2006 Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol sebanyak 2 kasus dan telah ditindaklanjuti 1 Kasus capaian kinerjanya 50%
3. Perda Nomor 15 tahun 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan sebanyak 14 kasus. Ditindaklanjuti 100 %
4. Perda Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Pemeliharaan dan Penertiban Ternak sebanyak 15 Kasus ditindaklanjuti 13 Kasus capaian kinerja 86,67 %.

Tabel 3.1

Data Pelanggaran Peraturan daerah Kab.Polewali Mandar Tahun 2021

| NO | JENIS PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI | JANUARI | | FEBRUARI | | MARET | | APRIL | | MEI | | JUNI | | JULI | | AGUSTUS | | SEPTEMBER | | OKTOBER | | NOVEMBER | | DESEMBER | | TOTAL | |
|----|---|---------|------------------|----------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|---------|------------------|-----------|------------------|---------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|--------|------------------|
| | | JUMLAH | DITINDAK LANJUTI | JUMLAH | DITINDAK LANJUTI | JUMLAH | DITINDAK LANJUTI | JUMLAH | DITINDAK LANJUTI | JUMLAH | DITINDAK LANJUTI | JUMLAH | DITINDAK LANJUTI | JUMLAH | DITINDAK LANJUTI | JUMLAH | DITINDAK LANJUTI | JUMLAH | DITINDAK LANJUTI | JUMLAH | DITINDAK LANJUTI | JUMLAH | DITINDAK LANJUTI | JUMLAH | DITINDAK LANJUTI | JUMLAH | DITINDAK LANJUTI |
| 1. | PERDA NOMOR 1 TAHUN 2010 Tentang Ketentrangan dan Keterbacaan Umum | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17 | 12 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | | | | | | | | | | | 30 | 29 |
| 2 | PERDA NOMOR 13 TAHUN 2006 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol | | | | | | | | | | | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 |
| 3 | PERDA NOMOR 5 TAHUN 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 4 | PERDA NOMOR 15 TAHUN 2010 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 14 | 14 |
| 5 | PERDA NOMOR 15 TAHUN 2007 Tentang Pemeliharaan dan Penertiban Ternak | | | | | 15 | 5 | | | 0 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | 15 | 13 |
| 6 | PERDA NOMOR 10 TAHUN 2010 Tentang Pajak Sarang Burung Walet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 7 | PERDA NOMOR 7 TAHUN 2011 Tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 8 | PERDA NOMOR 2 TAHUN 2008 Tentang Pengelolaan Irigasi Partisipatif | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 9 | PERDA NOMOR 13 TAHUN 2010 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 10 | PERDA NOMOR 14 TAHUN 2007 Tentang Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Non Kayu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 11 | PERDA NOMOR 5 TAHUN 2009 Tentang Pendidikan Gratis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 12 | PERDA NOMOR 6 TAHUN 2010 Tentang Pajak Reklame | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 13 | PERDA NOMOR 8 TAHUN 2010 Tentang Pajak Restoran | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 14 | PERDA NOMOR 9 TAHUN 2010 Tentang Pajak Hotel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 15 | PERDA NOMOR 11 TAHUN 2010 Tentang Pajak Penerangan Jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 16 | PERDA NOMOR 12 TAHUN 2010 Tentang Pajak Hiburan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | 8 | 8 | 4 | 4 | 19 | 9 | 20 | 15 | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 57 |

Pencapaian kasus Pelanggaran Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti dari tahun ke tahun mengalami penurunan sebagai berikut :

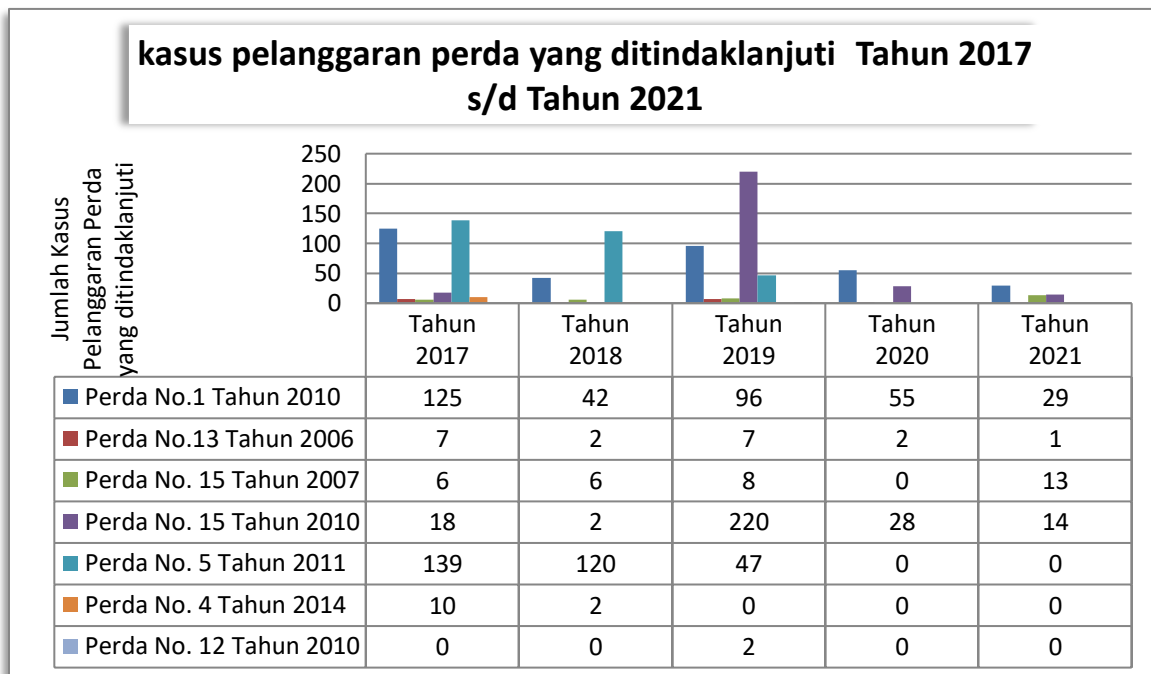
1. Tahun 2017 dari 6 Jenis Perda Jumlah Kasus Pelanggaran Perda sebanyak 352 ditindaklanjuti 305 Kasus dengan capaian kinerja 86 %
2. Tahun 2018 mengalami penurunan Jumlah Pelanggaran Perda sebanyak 206 Kasus yang ditindaklanjuti sebanyak 174 Kasus dengan capaian kinerja 84 %,
3. Tahun 2019 meningkat dengan jumlah Pelanggaran Perda sebanyak 380 Kasus ditindaklanjuti sebanyak 380 Kasus capaian kinerja 100 %

4. Tahun 2020 sangat menurun drastis Jumlah kasus 85 Kasus Pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti yaitu sebanyak 85 dari 3 Jenis Perda dengan capaian kinerja 100%
5. Tahun 2021 mengalami penurunan dengan jumlah Kasus 61 Kasus yang ditindaklanjuti sebanyak 57 Kasus atau 93 % capaian kinerja.

Dari data Pelanggaran Peraturan daerah 5 Tahun dapat dikategorikan bahwa masyarakat Kab. polewali mandar sebagian besar memahami dan sadar akan peraturan daerah yang berlaku di daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat Dalam grafik dibawah ini :

Grafik 2. kasus pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti



Upaya Satuan Polisi Pamong praja dalam Penanganan dan Penindakan Pelanggaran Perda dengan dilakukan beberapa Kegiatan seperti Operasi Yustisi Perbup Nomor 31 Tahun 2020, Menyerahkan Kasus Pelanggaran Peraturan Daerah Kepada PPNS untuk dilakukan Proses Penyidikan.

1. Operasi Yustisi

Pelaksanaan Operasi Yustisi Tindak pidana Pelanggaran Peraturan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Covid 19 dilaksanakan pada Tanggal 12 April 2021 di Depan Kantor BKPP Jl. Andi Depu dan

pelaksanaan Sidang di Pengadilan Negeri Polewali dengan melibatkan beberapa personil terdiri dari Unsur Satpol PP, PPNS OPD terkait dan didampingi Korwas Polres Polman serta anggota Satlantas ,Kasat Shabara Polres Polman .

Sasaran kegiatan Operasi Yustisi berupa Masyarakat atau badan hukum yang bebergian tidak mematuhi Peraturan Bupati bepergian tidak memakai Masker sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (2) huruf A angka 8 Perbup Nomor 31 Tahun 2020

Jumlah pelanggar yang terjaring atas pelanggaran ini sebanyak 104 orang, 104 Orang dilakukan proses pemeriksaan oleh PPNS dan berikan sanksi administrasi berupa surat pernyataan , dalam kasus ini tidak dilakukan sidang ditempat.

Gambar 20.

Operasi Yustisi



2. Sosialisasi Peraturan Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten polewali mandar dan Perbup nomor 44 tahun 2016 tentang kedudukan , susunan organisasi , tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar pada Struktur Satuan Polisi Pamong Praja Pada Bidang Penegakan Peraturan Perundang undangan Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan memiliki tugas pokok melakukan Penyuluhan atau Sosialisasi Peraturan Daerah.

Tahun 2021 pada Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten /Kota dan Peraturan Bupati/Walikota Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati /Walikota Terkait Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemeliharaan dan Penertiban Ternak dilaksanakan Pada 12 Maret 2021 di kecamatan Tinambung dengan Target Capaian 1 Kali Kegiatan 30 Orang Peserta dari unsur Tokoh masyarakat di kecamatan tinambung. Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi di Peraturan daerah Tentang Ternak dikecamatan tinambung berdasarkan Laporan Masyarakat setempat akan banyaknya tenak yang berkeliaran tanpa pengembala.



Faktor Penghambat Pencapaian Target Kinerja Indikator 1 :

Dalam pencapaian target kinerja indikator 1 secara umum kurang berjalan dengan maksimal dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hal yang menghambat diantaranya :

- Kurangnya koordinasi antar SKPD yang menjadi stake holder peraturan daerah
- Kurangnya pemahaman masyarakat tentang aturan-aturan yang berlaku.
- Keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan Sosialisasi terhadap Peraturan Daerah yang ada sehingga masyarakat kurang mengerti dan paham akan Peraturan Daerah .
- Seluruh Kegiatan Pengawasan Peraturan daerah difokuskan pada Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penerapan Displin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disiase 2019.

Adapun Program untuk mencapai indikator di atas adalah Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten /Kota dan Peraturan Bupati/Walikota untuk mencapai Target Capaian Kegiatan tersebut dilakukan beberapa Sub kegiatan antara lain :

- (1) Sosialisasi Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati /Walikota anggaran Rp.19.745.600,- realisasinya Rp.19.745.600 atau 100% Indikator Kinerja Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Target 1 Kali Indikator Capaian 1 Kali
- (2) Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota anggaran Rp.10.145.247,- realisasi Rp.10.145.247,- atau 100% Indikator Kinerja Jumlah Pelanggar perda yang dibina dan diawasi Target 73 Kasus Capaian 61 Kasus
- (3) Penaganan Peraturan daerah dan peraturan Bupati/Walikota anggaran Rp.27.889.075,- realisasi Rp. 27.879.175,- atau 99,99 % Indikator Kinerja Jumlah Pelanggaran Perda yang disidik dan ditindak Target 79 Kasus Capaian 57 Kasus.

A. Penegakan Perda Nomor 1 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum





Gambar 1.
Penertiban Pedagang Kaki Lima



Gambar 2.
Pedagang Kaki Lima Yang
Melanggar Menandatangani
Surat Pernyataan



Gambar 3.
Penertiban Penyakit
Masyarakat / Kos Kosan



Gambar 4.
Penertiban Anak Jalanan
(Anak Punk)



B. Penegakan Perda Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol

Gambar 5.
Penertiban Peredaran
Minuman beralkohol



Gambar 6.
Barang Bukti Miras yang
ditertibkan



Gambar 7.
Penyerahan Berkas Perkara
Kasus Miras Ke Pengadilan
Negeri , Pelaksanaan Sidang
Tipiring di Pengadilan Negeri
Polewali, dan Pemusnahan
Barang Bukti



C. Penegakan Perda Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pemeliharaan dan Penertiban ternak

Gambar 8.
Penertiban Ternak Yang Berkeliaran Tanpa
dikembalikan Oleh Pemiliknya



Gambar 9.
Pemeriksaan Terhadap Pemilik ternak
Yang Berkeliaran tanpa dikembalikan



D. Penegakan Perda Nomor 15 tahun 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan

Gambar 10.
Pendataan / Pengawasan Bangunan yang
tidak memiliki IMB



E. Penegakan Perda Nomor 5 tahun 2011 tentang Administrasi Kependudukan dan catatan sipil



Gambar 11.
Operasi Yustisi Perda Nomor 5 Tahun 2011
(Menjaring Masyarakat yang tidak membawa
KTP)

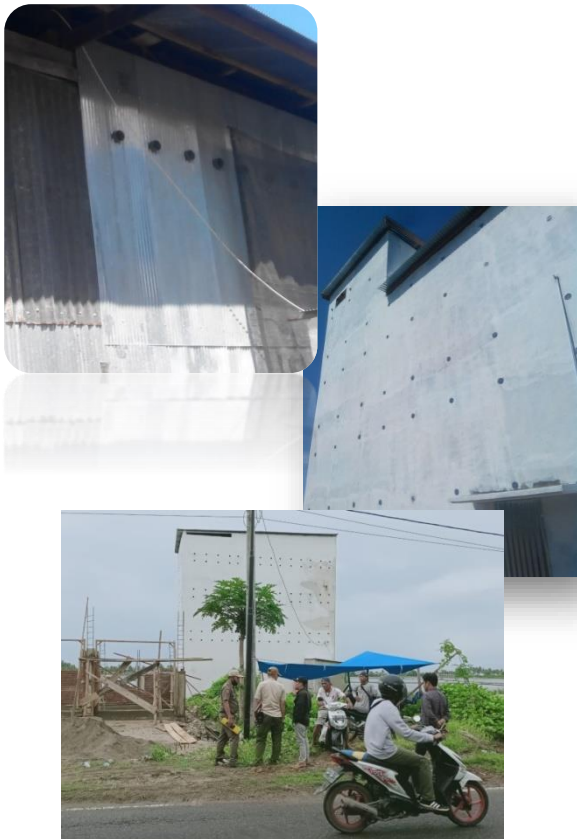


Gambar 12.
Pemeriksaan Oleh PPNS Terhadap
Masyarakat yang tidak membawa KTP

Gambar 13.
Proses Persidangan Tindak Pidana Ringan
(Operasi YustisiKTP)



F. Penegakan Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Izin Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarang Burung Walet



Gambar 14.
Penertiban Sarang Burung Walet

3.1.1.2. Capaian Sasaran 2 : Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

Indikator Kinerja 2. Persentase Gangguan Keamanan Ketertiban dan Ketentraman yang ditindaklanjuti

Untuk mencapai ketertiban umum dan ketentraman dan keindahan masyarakat Secara keseluruhan sangat didukung dengan adanya Peraturan daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum dan Peraturan Bupati .

Satuan Polisi Pamong Praja telah berhasil melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang diwujudkan dalam keberhasilan pencapaian sasaran, tetapi pada kenyataan yang terjadi dilapangan masih banyaknya masyarakat yang kurang sadar mengenai aturan-aturan yang ada sehingga memakai fasilitas umum dalam melakukan perbuatan asusila contohnya : menggunakan tempat kost-kos'tan, stadion olah raga, TPI (Tempat Pelelangan Ikan) serta tempat-tempat umum lainnya untuk berbuat yang tidak sesuai dengan Peraturan, Etika, Norma Budaya dan Nilai-nilai Agama di Kabupaten Polewali Mandar. Untuk melihat capaian tersebut dapat kita lihat pada Indikator Kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.2

Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

| | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET | REALISASI |
|---|---|---------------|---------------|------------------|
| 1 | Persentase Gangguan Ketertiban Umum dan ketentraman Masyarakat yang ditindaklanjuti | Persen | 100 | 96,6 |

Pencapaian Indikator diatas tercapai dengan beberapa kegiatan operasional Satpol PP seperti pelaksanaan Operasi Pekat, Patroli Wilayah Ketentraman dan Ketertiban Umum , Penertiban dan Pengamanan Kegiatan dapat dirumuskan sebagai berikut :

$\frac{\text{Jumlah Gangguan Trantibmas yang ditindaklanjuti Tahun 2021}}{\text{Jumlah Gangguan Trantibmas Tahun 2021}} \times 100\%$

$\frac{29 \text{ Gangguan Trantibmas yang ditindaklanjuti}}{30 \text{ Gangguan Trantibmas}} \times 100\%$

30 Gangguan Trantibmas

1. Operasi / Patroli Keamanan , Ketertiban dan Ketentraman masyarakat (K3) .

Pelaksanaan Patroli K3 ini adalah kegiatan pelaksanaan rutin bagi aparat Satuan Polisi Pamong praja yang dilaksanakan dari bulan Januari sampai dengan desember 2021 yang melibatkan sebanyak 6 s/d 10 orang aparat Satpol PP dalam satu kali kegiatan. Sasaran kegiatan ini adalah gangguan Ketertiban umum yang dikategorikan menjadi 10 kategori tertib antara lain :

1. Tertib Jalan
2. Tertib Jalur Hijau, Taman dan tempat Umum
3. Tertib Sungai , saluran , kolam dan lepas pantai
4. Tertib lingkungan
5. Tertib Usaha
6. Tertib bangunan
7. Tertib Sosial
8. Tertib Kesehatan
9. Tertib tempat hiburan dan keramaian
10. Tertib Peran serta masyarakat

1. Hasil Pelaksanaan Patroli K3 untuk tahun 2021 sebanyak 30 Kasus terdiri atas :

- a. Tertib Usaha 5 Kasus di Tindak lanjuti 5 Kasus
 - Pelanggaran Pedagang Kaki Lima yang berdagang, berusaha di bagian jalan/trotoar, halte, dan tempat-tempat untuk kepentingan umum lainnya sebanyak 5 Kasus
- b. Tertib Bangunan 3 Kasus ditindaklanjuti 2 Kasus

- Mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, ruang milik sungai, ruang milik waduk, ruang milik danau, taman dan jalur hijau, kecuali untuk kepentingan dinas
3 Kasus
- c. Tertib Kesehatan 20 Kasus ditindaklanjuti 20 Kasus
 - Tidak mematuhi Potokol Kesehatan 20 Kasus
- d. Tertib Peran serta Masyarakat 2 Kasus ditindaklanjuti 2 Kasus
 - Menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut-atribut lainnya pada pagar pemisah jembatan, pagar pemisah jalan, jalan, halte, terminal, taman tiang listrik dan tempat umum lainnya tanpa mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk 2 Kasus

Gambar 15.

Operasi Gangguan K 3



Tabel 3.3

DATA KASUS KETERTIBAN , KETENTRAMAN DAN KEINDAHAN YANG DITINDAKLAJUTI TAHUN 2021

| NO | JENIS PELANGGRAN K3 | JANUARI | | FEBRUARI | | MARET | | APRIL | | MEI | | JUNI | | JULI | | AGUSTUS | | SEPTEMBER | | OKTOBER | | NOVEMBER | | DESEMBER | | TOTAL | | |
|----|--|---------|------------------|----------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|---------|------------------|-----------|------------------|---------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|--------|------------------|----|
| | | JUMLAH | DITINDAK LANJUTI | JUMLAH | DITINDAK LANJUTI | JUMLAH | DITINDAK LANJUTI | JUMLAH | DITINDAK LANJUTI | JUMLAH | DITINDAK LANJUTI | JUMLAH | DITINDAK LANJUTI | JUMLAH | DITINDAK LANJUTI | JUMLAH | DITINDAK LANJUTI | JUMLAH | DITINDAK LANJUTI | JUMLAH | DITINDAK LANJUTI | JUMLAH | DITINDAK LANJUTI | JUMLAH | DITINDAK LANJUTI | JUMLAH | DITINDAK LANJUTI | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 1 | Tertib Jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 2 | Tertib Jalur Hijau Taman dan Tempat Umum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 3 | Terib Sungai Saluran ,Kolam dan Lepas Pantai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 4 | Tertib Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 5 | Tertib Usaha | | | | | | | | | 2 | 2 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | 5 | 5 |
| 6 | Tertib Bangunan | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 0 | | | | | | | | 3 | 2 |
| 7 | Tertib Sosial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 8 | Tertib Kesehatan | | | 3 | 3 | 15 | 15 | | | | | | | | | 2 | 2 | | | | | | | | | | 20 | 20 |
| 9 | Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 10 | Tertib Peran Serta Masyarakat | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 |
| | TOTAL | 0 | 0 | 5 | 5 | 16 | 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 29 |

Mencemati data Kasus Pelanggaran gangguan Ketertiban umum diatas dari bulan Januari sampai dengan Desember tiga bulan terakhir Oktober .November dan Desember tidak ada Pelanggaran Gangguan ketertiban Umum ini berdampak dari Pelaksanaan Patroli Gangguan Ketertiban umum yang dilakukan oleh aparat Satpol PP secara intensif , dan Pelaksanaan Patroli Gabungan Satpol PP ,TNI, dan Polri .

Masyarakat Kabupaten Polewali Mandar sadar akan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarat dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum.

Untuk mencapai ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Secara keseluruhan Satuan Polisi Pamong Praja bekerjasama dengan PPNS telah berhasil melaksanakan tugas Pokok dan Fungsi mengawal Peraturan dan Daerah dan Peraturan Bupati . Untuk melihat capaian tersebut dapat kita lihat pada beberapa Indikator Kinerja .

Persentase gangguan K 3 (Ketertiban, Keamanan dan Ketentraman) yang ditindak lanjuti sesuai standar prosedur.

Kasus Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) meliputi : Penertiban Anak Sekolah, Penertiban Pedagang kaki Lima, Penertiban Baleho/Spanduk, Penertiban Kost-Kosan, Anak jalanan, dan Pengamanan. Kasus Pelanggaran Keamanan, Ketertiban, dan Ketentraman masyarakat dari tahun ke tahun semakin meningkat. Untuk tahun 2015 Jumlah kasus 162 kasus yang terselesaikan 160 kasus atau 99 % sedangkan untuk tahun 2016 Jumlah Kasus mengalami peningkatan menjadi 180 kasus terselesaikan 180 kasus atau 100%, tahun 2017 Jumlah kasus K3 sebanyak 452 teselesaikan 100 % , tahun 2018 Jumlah kasus menurun sebanyak 310 Kasus terselesaikan 100 % , Tahun 2019 Jumlah Kasus 122 Kasus Terselesaikan 100% . Tahun 2020 Jumlah angka Kasus K3 berkurang dibandingkan jumlah Kasus K3 tahun sebelumnya,

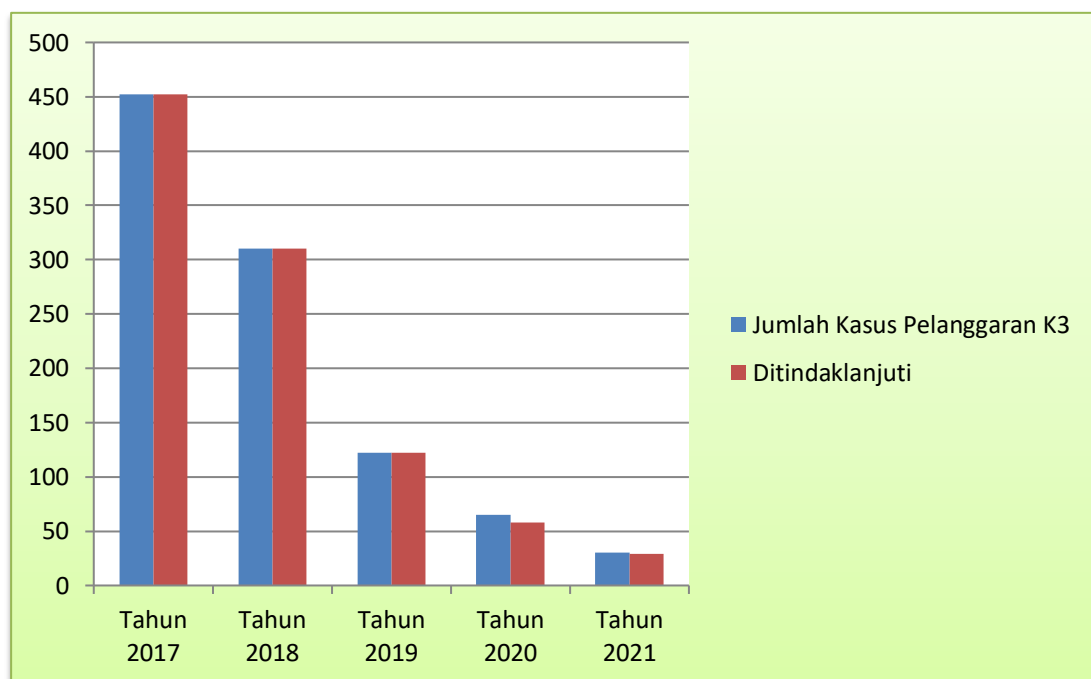
Jumlah Kasus K3 Tahun 2021 berdasarkan Pengaduan masyarakat dan Temuan langsung Petugas dilapangan sebesar 30 Kasus dan ditangani 29 Kasus 96,67 % dikategorikan Penanganan Gangguan K3 cukup berhasil dan besarnya kesadaran Masyarakat dilihat dari Jumlah K3 Tahun 2020 sebesar 65 Kasus turun menjadi 30 Kasus ditahun 2021.

Faktor Penghambat Pencapaian Taarget Kinerja Indikator 2 :

Dalam pencapaian target kinerja indikator 2 terdapat beberapa hal yang menjadi yang menghambat dalam pencapaian target yaitu :

- Terdapat kasus pelanggaran K3 yang bukan kapasitas Satpol Polisi Pamong Praja untuk menyelesaikannya seperti kasus tindak pidana umum yang mejadi kapasitas Kepolisian Negara.
- Kurangnya kordinasi antara intansi terkait dalam penyelesaian pelanggaran K 3
- Anggaran Operasional penegakan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum di Recofusing sehingga kegiatan operasional dilapangan terbatas.

Grafik.1 Persentase kasus Ketertiban, ketentraman dan keindahan yang ditindaklanjuti



Adapun Program untuk mencapai indikator di atas adalah Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dengan Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) daerah Kabupaten /Kota Pada sub Kegiatan sebagai berikut :

- (1) Pencegahan Gangguan Ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, Pembinaan dan penyuluhan , Pelaksanaan Patroli ,Pengamanan dan Pengawasan

Pagu Anggaran Rp.15.851.908 realisasinya Rp.15.513.700 atau 97,87% . Indikator Kinerja Jumlah Pelaksanaan Patroli Target 12 Kali Capaian 12 Kali atau 100 %.

- (2) Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa Rp.217.990.000,- realisasinya Rp.217.990.000 atau 100%, Indikator Kinerja Jumlah Penanganan gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban umum Target 84 Kali capaian Kali atau 100 %
- (3) Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam tehnik pencegahan dan penanganan Gangguan ketentraman dan ketertiban umum Pagu anggaran Rp. 9.994.850,- realisasi Rp.9.994.850,- atau 100% indikator Kinerja Jumlah Pelaksanaan Operasi Pekat Kerjasama TNI/POLRI target 1 kali Capaian 1 Kali atau 100 %

Dengan direalisasikan Program kegiatan Prioritas Satpol PP Tahun 2021 pada 3 Sub Kegiatan untuk mencapai indikator Kinerja dapat dilihat dari beberapa output Kegiatan Satpol PP Kab. Polewali Mandar pada tahun 2020 sebagai berikut :

1. Patroli Wilayah Trantibum

Pelaksanaan Patroli wilayah Trantibum dilaksanakan rutin di wilayah Kecamatan Polewali dan Wonomulyo yang melibatkan 6 sampai 10 orang Personil

Pengawasan dan Patroli terhadap Personil Satpol PP yang bertugas dip Pos Penjagaan dilakukan oleh Petugas Internal Satpol PP (PTI) setiap hari dengan Jumlah PTI Satpol PP sebanyak 5 Orang

Gambar 16
Pengawasan oleh Petugas Tindak Internal



Gambar 17
Pengawasan dan Apel Pengecekan Pasukan



Gambar 18
Pelaksanaan Patroli Wilayah Trantibum



2. Penanganan Gangguan Keamanan Ketentraman dan Ketertiban umum

Pelaksanaan Pengamanan ,Penertiban dan Pengawasan adalah tugas pokok dari Satuan Polisi Pamong Praja sebagai mana diatur dalam Undang Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati nomor 13 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis SOP Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam pelaksanaan Penanganan Gangguan Keamanan Ketentraman dan Ketertiban umum Satpol PP membentuk beberapa unit yang melibatkan personil dalam pelaksanaan kegiatan diberikan tugas dan wewenang masing masing antara lain :

1. Petugas Pengendalian Masyarakat (DALMAS) 31 Orang Personil
2. Petugas Tindak Internal (PTI) 5 Orang Personil
3. Petugas Lidik 5 Orang Personil
4. Petugas Pengamanan Aset Pos Penjagaan Kantor Bupati ,Kantor DPRD , Rujab Bupati, Rujab Wakil Bupati ,Rujab Sekretaris Daerah dan Pos Alun Alun 93 Orang
5. Petugas Trantib Kecamatan 34 Orang Personil

Beberapa Aset Daerah seperti Kantor Bupati ,Kantor DPRD , Rujab Bupati, Rujab Wakil Bupati ,Rujab Sekretaris Daerah dilakukan Pengamanan 1 x 24 Jam secara bergantian oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan melibatkan 93 Orang Personil Satpol PP.

Gambar 19
Dokumentasi Pengamanan di Setiap Pos dan Pengawasan oleh PTI Satpol PP



Pos 1 Kantor Bupati



Pos 2 Kantor Bupati (Dalmas)



Pos Rujab Wakil Bupati



Pos Rujab Bupati



Pos Rujab Sekretaris Daerah



Pos Kediaman Wakil Bupati



Pos Kantor DPRD

Selain Petugas Pengamanan Aset Daerah adapun Tim Dalmas Satpol PP yang melaksanakan Pengamanan ,Penertiban dan Pengawalan seperti Pengamanan Aksi Ujuk Rasa , Penertiban Gangguan K3, Pengamanan Kegiatan Acara Kabupaten dan Upacara Besar dan Pengawalan Pejabat dan Tamu VIP . disetiap Kegiatan di Tugaskan Anggota lidik untuk turun terlebih dahulu melakukan survei dilapangan kemudian memberikan laporan awal kondisi dan situasi dilapangan.

Jumlah Aksi Unjuk Rasa/ Aksi Damai dan Kerusuhan Massa Tahun 2021

Jumlah Aksi unjuk rasa tahun 2021 di wilayah Hukum Kabupaten Polewali Mandar untuk tahun 2021 sebanyak 6 Aksi yang dilakukan oleh Unsur Masyarakat, Mahasiswa dan Bebarapa Lembaga di beberapa titik dengan aksi Damai, berikut daftar aksi unjuk rasa Tahun 2021:

Tabel 3.4

| NO | TANGGAL/JAM | URAIAN / TUNTUTAN | NAMA OKP | KORLAP / JUMLAH MASSAAKSI | SASARAN OPDYANG DITUJU | TEMPAT DITERIMA | KET |
|----|------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|--|---|--|
| 1. | 5 FEBRUARI 2021/ 11.32 WITA. | <ul style="list-style-type: none"> - TUNDA TAHAPAN PILKADES - REVISI PERDA NO 5 TAHUN 2017 - LAKSANAKAN PILKADES YANG SEHAT DEMOKRASI DIKORUPSI - MENDESAK BUPATI UNTUK MENGHILANGKAN TES WAWANCARA | ALIANSI MASYARAKAT POLMAN | URDY / SEKITAR 150 MASSA | DINAS PEMBERDAYAA NMASYARAKAT DAN DESA (PMD)POLMAN | KANTOR BUPATI DAN DPRD PEJABAT YANG MENERIMA ASISTEN I PEMERINTAHAN DAN DINAS PMD | MASSA BERKONFOI DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN RODA EMPAT DAN RODA DUA MASSA ORASI DIDEPAN KANTOR BUPATI DAN SELANJUTNYA MENUJU KANTOR DPRD MASSA MEMBAWA SPANDUK DAN MEMBAKAR BANK DI DEPAN KANTORBUPATI. |

| | | | | | | | |
|----|------------------------------------|--|--|--|--|---|---|
| 2. | 13 AGUSTUS 2021 / 10.45 WITA | MENGECEM PELABELAN KATA BODOHYANG DILONTARKAN BUPATI COPOT OKNUM KEPALA DINAS YANG MELAKUKAN TINDAKAN REPRESIP KEPADA KOHATI CABANG POLMAN MEMINTA BUPATI MENGKLARIFIKASI TERDAPA TUDINGAN BAHWA HMI DITUNGGANGI COPOT PLT. DAN MENUNJUK PEJABAT DEPENITIF. PERJELAS ANGGARAN REFOCUSINGCOVID- 19. COPOT KETUA SATGAS. | HIMPINAN MAHASISW AISLAM (HMI) CABANG POLMAN. | SEKITAR 200 MASSA / KORLAP MUHAMMAD RIDWAN. | RSUD POLEWALI | KANTOR BUPATI DAN KANTOR DPRD POLMAN/ DITERIMAH BUPATI POLMAN STAF AHLI BUPATI DAN KABAG. HUMAS SETDA. | AKSI DAMAI DENGAN MENGUNAKA N KENDARAAN RODA EMPAT DAN RODA DUA MEMBAWA SPANDUK DAN SELEBARAN KERTAS. |
| 3. | 4 OKTOBER 2021 / 10.10 WITA | MEMINTA DAN MENDESAK BUPATI POLEWALI MANDAR MEMBUKA DAN MEMBERIKAN SELURUH DOKUMEN TERKAIT REALISASI BELANJA SEWA SARANA MOBILITAS KENDARAAN RODA 4MPAT TA. 2014-2020 YANG TENDERNYADIMENANGKAN OLEH CV.BINANGA DAN MARIO UTAMA. MENITA DAN MENDESAK KETUA DPRDKAB. POLMAN MENGGELAR RAPAT PARIPURNA PENGUNAAN HAK INTERPELASI TERKAIT REALISASI BELANJA SEWA SARANA MOBILITAS KENDARAAN RODA EMPAT TA.2014- 2020. MEMINTA DAN MENDESAK BUPATI POLEWALI MANDAR MEMBUKA DAN MEMBERIKAN SELURUH DOKUMENTERKAIT REALISASI ANGGARAN BELANJA DANA HIBAH TAHUN ANGGARAN 2019 -2020. | LEMBAGA KAJIAN DAN PENGAWASA N ANGGARAN (LKPA) CABANG POLMAN / | KORLAP SUBAER./ 165 ORANG | DESA PAKU KEC.BINUANG DAN KANTOR BUPATI | KANTOR BUPATI DAN DPRD/DITERIMAH ASISTEN DAN STAF AHLI BUPATI KABAG HUMAS. | MASSA MELAKUKAN ORASI DEPAN KANTOR BUPATI DAN MEMBAWA SPANDUK SELANJUTNYAMASSA MENUJU DPRDPOLMAN |

| | | | | | | | |
|----|----------------------------|---|---|---|--|--|--|
| 4. | 11 Juni 2021/12.00 wita | MENDESAK BUPATI AGAR MALAKUKAN PENUTUPAN DAN TPA SAMPAH PAKU SEGERA DITUTUP. SUDAH 10 TAHUN TPA PAKU BEROPERASI HANYA MEMBERIKAN DAMPAK BURUK KEPADA MASYARAKAT.TOLAK SAMPAH. | AN.MASYARAKAT DAN LSM MAHASISWA BATETANGGA. DAN PAKU | MASSA SEKITAR 100 ORANG. KORLAP RUDI | DINAS DINAS LINGKUNG ANHIDUP (DLHK) POLMAN | KANTOR BUPATI DAN KANTOR DPRD ASISTEN 1 DANKABAG HUMAS. | MASSA AKSI DAMAI ORASI DEPAN KANTOR DAN KONFOI MENUJU DPRD DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN RODA EMPAT DAN DUA SERTA MEMBAWA SPANDUK |
| 5. | 24 MEI 2021/11.00 WITA | DEMO WARGA MENOLAK PENGADAAN AIR BERSIH DI DESA KUNYI KEC. ANREAPI. MENDESAK BUPATI AGAR MEMBATALKAN PROYEK PENGADAAN AIR BERSIH DI KUNYI DIKARENAKAN SAWAH PETANI KERING AKIBAT AIR TIDAK CUKUP. | WARGA MASYARAKAT DESA KUNYI KEC. ANREAPI. | MASSA SEKITAR 200 LEBIH./ KORLAP SABIR | KANTOR BUPATI POLMAN | KANTOR BUPATI DAN MENUJU DPRD DITERIMAH OLEH ASISTEN DAN KASAT POL PP | MASSA ORASI DI HALAM RUA NG LOBI BUPATI DAN SELANJUTNYA MASSA MENUJU DPRD. |
| 6. | 18 OKTOBER/ 12.10 WITA | MENDESAK PEMDA BUPATI AGAR PANITIA PILKDES DI PECAT. PROTES SEKAITAN DENGAN UNDANG BERLAKU SURUT. MENDESAK DPR AGAR MELAKUKAN RAPAT PARIPURNA TERKAIT PERDAPILKADES. | MAHASISWA GABUNGAN LKAP DAN HMI ALIANSI MASYARAKAT POLMAN . | MASSA SEKITAR 200 LEBIH / KORLAP SUBAIR DAN ALIMUDDIN | DINAS PMD | KANTOR BUPATI DAN KANTOR DPRD DITERIMAH OLEH KABID.PEMDES.ASISTEN II SETA DAN KASAT POL PP | MASSA ORASI DI HALAM RUA NG LOBI BUPATI DAN SELANJUTNYA MASSA MENUJU DPRD |

Gambar 20

FOTO DOKUMENTASI UNJUK
RASA TAHUN 2021



| | | | | |
|----|--|---|--|--|
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |



3. Operasi Pekat

Pelaksanaan Operasi Pekat dilaksanakan rutin di wilayah Kabupaten Polewali Mandar dengan melibatkan Unsur PPNS dan anggota Satpol PP .

Pada Hari Sabtu Tanggal 1 Mei 202 telah dilaksanakan Operasi Pekat yang melibatkan Satpol PP, PPNS Korwas PPNS, TNI dan Polri Sasaran kegiatan operasi pemberantasan penyakit Masyarakat (Pekat) berupa Penertiban Rumah Kos kosan, Penginapan, Hotel penjualan minuman beralkohol , narkoba, anak gelandangan, pengamen dan gangguan K3 Lainnya hasil dilapangan antara lain :

1. Ditemukan 1 Pasang mesum (belum pernah menikah) di Kos Kosan Kecamatan Wonomulyo .
2. Ditemukan 1 Orang Pengujung Penginapan tanpa identitas diwilayah Kelurahan Pekkabata Kec.Polewali
3. Ditemukan 1 Box obat Batuk komix yang diduga untuk penyalahgunaan dengan cara yang salah disalah satu taman Patung Pemuda Kelurahan Polewali Kecamatan Polewali.

Tindak lanjut atas Pelanggar Ketertiban umum sebagaimana diatur Pada Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum berupa tindakan persuasif pembinaan seperti pemberian surat Teguran dan Surat Pernyataan untuk tidak mengulangi kembali pelanggaran yang telah dilakukan.

Jumlah Kasus Pelanggaran K3 dalam kegiatan ini adalah 3 Kasus

Gambar 21.

Operasi Pekat (Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)



Gambar 22.
Proses Penindakan terhadap Pelanggar K3 ,Pasangan bukan Suami Isteri
(Proses Pemeriksaan dan Penandatanganan Surat pernyataan)



3.1.1.3. Capaian Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja

- Indikator Kinerja 3 :
- a. Persentase Satpol PP yang memiliki Kualifikasi (Dasar)
 - b. Persentase Satpol PP yang memiliki Kualifikasi (Tehnis)

Tabel 3.5

Meningkatnya Kualitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja

| INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET | REALISASI | % |
|--|--------|--------|-----------|-----|
| 1 Persentase Satpol PP yang memiliki kualifikasi : | | | | |
| - Dasar | Persen | 74 | 43,8 | 58 |
| - Tehnis | Persen | 3 | 7,14 | 238 |

Persentase anggota Satpol PP yang memiliki Kualifikasi Dasar :

Berdasarkan Capaian Indikator kinerja Persentase anggota Satpol PP yang memiliki Kualifikasi Dasar dari target 27 Persen yang terealisasi 33,9 % dapat uraikan sebagai berikut :

Jumlah anggota Satpol PP yang ada sebanyak 315 orang terdiri dari 112 PNS 120 orang Tenaga Bantu Satpol PP , sedangkan PNS yang telah memenuhi standar kompetensi dasar Satpol PP sebanyak 49 orang sehingga persentase capaian sebesar 43.8 % dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Satpol PP (PNS) yang telah memenuhi kualifikasi Dasar Satpol PP}}{\text{Jumlah Personil Satpol PP Kab.Polewali Mandar (PNS)}} \times 100 \%$$

$$\frac{49 \text{ Orang}}{112 \text{ Orang}} \times 100\% = 43,8 \%$$

112 Orang

Persentase anggota Satpol PP yang memiliki kualifikasi Tehnis :

Berdasarkan Capaian Indikator kinerja Persentase anggota Satpol PP yang memiliki Kualifikasi Tehnis dari target 3 Persen yang terealisasi 7,14 % dapat uraikan sebagai berikut :

Jumlah PNS Satpol PP yang ada sebanyak 112 , sedangkan PNS yang telah kualifikasi Tehnis sebanyak 8 orang dengan rincian :

- Tehnis PPNS 4 Orang
- Tehnis Bela Negara 4 Orang

sehingga persentase capaian sebesar 7.14 % dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Satpol PP (PNS) yang telah memenuhi kualifikasi Tehnis}}{\text{Jumlah Personil Satpol PP Kab.Polewali Mandar (PNS)}} \times 100 \%$$

8 Orang x 100% = 7,14 %

112 Orang

Jumlah Penyidik Pegawai negeri Sipil (PPNS) Satpol PP sebanyak 4 orang .

Satpol PP Berdasarkan Permendagri Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja .

Peraturan MenPAN dan RB Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya bertujuan mendorong profesionalisme Polisi Pamong Praja untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Kemendagri sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja (Jafung Pol PP) melalui Direktorat Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen BAK). Pasal 38 Peraturan MenPAN dan RB Nomor 4 Tahun 2014 memberi kesempatan kepada Pol PP yang bertugas saat ini menjadi Jafung Pol PP melalui Inpassing atau penyesuaian dalam jabatan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PNS yang disesuaikan (inpassing) dalam Jabatan Fungsional Pol PP Tingkat Terampil, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. berijazah paling rendah SLTA atau yang setingkat ;
2. pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a;
3. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
4. memiliki pengalaman di bidang Pol PP paling kurang 2 (dua) tahun;
5. sehat jasmani dan rohani;
6. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
7. mengikuti dan lulus uji kompetensi.

PNS yang disesuaikan (inpassing) dalam Jabatan Fungsional Pol PP Tingkat Ahli, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV;
2. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
3. usia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun;
4. memiliki pengalaman dibidang Pol PP paling kurang 2 (dua) tahun;
5. sehat jasmani dan rohani;
6. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
7. mengikuti dan lulus uji kompetensi.

Untuk menjadi Jafung Pol PP melalui inpassing maka setiap PNS Pol PP harus mengikuti dan lulus uji kompetensi. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri telah menyusun Standar Kompetensi Jabatan Fungsional melalui Surat Edaran (SE) Mendagri No. 800/120/SJ tanggal 15 Januari 2016, yang memuat 18 unit kompetensi Tingkat Ahli dan 14 unit kompetensi Tingkat Terampil.

Uji kompetensi dilakukan oleh Asesor Kompetensi dengan menggunakan instrumen uji yaitu uji tertulis dan verifikasi dokumen portofolio yaitu setiap asesi (peserta uji kompetensi) harus membawa 2 (dua) bukti kerja berupa Surat Perintah dan Laporan untuk setiap unit kompetensi yang diujikan. Apabila hasil uji tertulis dibawah batas nilai minimum (60) maka asesi akan diberikan kesempatan mengikuti uji lisan (wawancara) sesuai dengan nilai unit kompetensi yang kurang pada uji tertulis.

Unit kompetensi yang diuji untuk asesi Jafung Pol PP Tingkat Ahli ada 5 (lima) unit kompetensi yaitu

1. melakukan koordinasi penegakan Perda;
2. melakukan tindakan non yustisi;
3. melakukan patroli;
4. melakukan pengendalian masa; dan
5. melakukan mobilisasi perlindungan masyarakat.

Untuk asesi Jafung Pol PP Tingkat Terampil ada 4 (empat) unit kompetensi yaitu:

1. melakukan tindakan non yustisi;
2. melakukan patroli;
3. melakukan pengendalian masa; dan
4. melakukan pendataan dan pelatihan perlindungan masyarakat.

Dari beberapa persyaratan memenuhi syarat kompetensi untuk menduduki jabatan fungsional Satpol PP beberapa persyaratan telah dipenuhi anggota Satpol PP kab. Polewali Mandar dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3.6
Satuan Polisi Pamong Praja yang memenuhi Standar Kompetensi

| Aspek | Jumlah |
|-----------------------------|--------|
| 1 Pendidikan | |
| -SLTA | 39 |
| - DIPLOMA | 1 |
| - SI | 83 |
| - S2 | 2 |
| 2. Diklat | |
| - Diklat dasar Satpol PP | 49 |
| - Diklat PPNS | 4 |
| 3. - Diklat Bela Negara | 4 |
| Pangkat /Gol Ruang | |
| - Pengatur Muda TK. I / IIb | 11 |
| - Pengatur / IIc | 27 |
| - Pengatur TK. I / IId | 3 |
| - Penata Muda / III a | 34 |
| - Penata Muda TK. I / III b | 42 |
| - Penata / III c | 1 |

| | |
|------------------------|---|
| - Penata TK.I / III d | 4 |
| - Pembina TK. I / IV b | 1 |

**Gambar 23 .
 Pelatihan Dasar Satpol PP yang dilaksanakan di Kompi 721 Makassar tahun 2019**



**Gambar 24 .
 Peningkatan Kapasitas Aparat Satpol PP Tahun 2021**



Rasio pendistribusian Satpol PP terhadap jumlah Kecamatan 1 : 1

Rasio pendistribusian anggota Satuan Polisi Pamong Praja Pada Tahun 2016 adalah 1 : 1. Sedangkan pada tahun 2017 masih tetap 1 : 1 terhadap jumlah kecamatan. Pada Tahun 2018 dari 16 Kecamatan yang ada di Kabupaten Polewali Mandar, ada 16 anggota Satpol PP yang tugaskan di 13 Kecamatan (87,5%). Begitu juga dengan tahun 2015 dan 2016 masih tetap 13 kecamatan anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas di Kecamatan,

itupun penyebaran tersebut tidak merata 1 : 1 karena pertimbangan trend gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kecamatan yang berbeda. Sedangkan untuk tahun 2021 ditempatkan 16 kecamatan dengan jumlah personil Satpol PP sebanyak 34 orang. Penyebaran Anggota Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan tidak merata disesuaikan dengan tingkat kerawanan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Untuk 4 kecamatan pelosok personil Satpol PP yang ditugas1 Orang 1 Kecamatan antara lain Kecamatan , Bulu ,Limboro,Tutar dan alu , Kecamatan Wonomulyo 5 orang Polewali 4 orang

Faktor Penghambat Pencapaian Taarget Kinerja Indikator 3 :

Dalam mencapai target pada Indikator 2, ada beberapa kendala-kendala yang dihadapi diantaranya :

- Kurangnya personil Satuan Polisi Pamong Praja sehingga penyebarannya tidak merata
- Masih Banyak PNS Satpol PP yang belum mengikuti diklat Dasar yang diselenggarakan Kemendagri karena keterbatasan anggaran untuk mengirim personil
- Anggaran Diklat PPNS dihapus
- Biaya Peningkatan Kapasitas Satpol PP di Recofusing
- Anggota Satpol PP belum memahami Tugas dan Fungsinya di Kecamatan
- Belum terjalin komunikasi antara Anggota Satpol PP dengan Pihak Kecamatan dalam hal penegakan Perda dan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Untuk lebih jelasnya tentang pendistribusian Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2021 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 3. Pendistribusian Satpol PP terhadap Jumlah Kecamatan



3.1.1.4. Capaian Sasaran 4 : Meningkatnya Kesiapsiagaan Perlindungan Masyarakat

Tabel 3.7 Meningkatnya Kesiapsiagaan Perlindungan Masyarakat

| INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET | REALISASI | % |
|---|--------|--------|--------------|------|
| 1 Persentase Kecamatan yang memiliki tenaga Satlinmas yang mempunyai kualifikasi kemampuan dasar dan tehnik yang memadai | Persen | 81 | 14 Kecamatan | 87,5 |

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat secara luas. Rasio jumlah Linmas menggambarkan kapasitas partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat guna terciptanya kondisi lingkungan yang kondusif.

Jumlah Kecamatan yang telah memiliki tenaga satlinmas yang mempunyai kualifikasi tehnik yang memadai adalah 14 Kecamatan dapat dilihat pada tabel daftar tenaga Satlinmas yang telah dilatih di Kabupaten sebagai berikut :

Tabel 3.8

Daftar tenaga Satlinmas yang telah dilatih di Kabupaten

| No. | Nama Peserta | Jenis Kelamin | UTUSAN | Alamat | Pelaksanaan | | Penyelenggara |
|-----|--------------------|---------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|---|
| | | | | | Tempat | Waktu | |
| 1 | MARZUKI | L | KEC. POLEWALI | KEC. POLEWALI | HOTEL BUMI RAYA | 10 S/D 11-4-2019 | BIDANG PERLIDUNGAN MASYARAKAT SATPOL PP |
| 2 | SARBING | L | KEC. POLEWALI | KEC. POLEWALI | HOTEL BUMI RAYA | 10 S/D 11-4-2019 | BIDANG PERLIDUNGAN MASYARAKAT SATPOL PP |
| 3 | AFRAN | L | KEC. POLEWALI | KEC. POLEWALI | HOTEL BUMI RAYA | 10 S/D 11-4-2019 | BIDANG PERLIDUNGAN MASYARAKAT SATPOL PP |
| 4 | MASRIANTO | L | KEC. BINUANG | KEC. BINUANG | HOTEL BUMI RAYA | 10 S/D 11-4-2019 | BIDANG PERLIDUNGAN MASYARAKAT SATPOL PP |
| 5 | EDI BIN PONRENG | L | KEC. BINUANG | KEC. BINUANG | HOTEL BUMI RAYA | 10 S/D 11-4-2019 | BIDANG PERLIDUNGAN MASYARAKAT SATPOL PP |
| 6 | ASLAM | L | KEC. ANREAPI | KEC. ANREAPI | HOTEL BUMI RAYA | 10 S/D 11-4-2019 | BIDANG PERLIDUNGAN MASYARAKAT SATPOL PP |
| 7 | SAPARUDDIN | L | KEC. ANREAPI | KEC. ANREAPI | HOTEL BUMI RAYA | 10 S/D 11-4-2019 | BIDANG PERLIDUNGAN MASYARAKAT SATPOL PP |
| 8 | JUSSAM | L | KEC. BULO | KEC. BULO | HOTEL BUMI RAYA | 10 S/D 11-4-2019 | BIDANG PERLIDUNGAN MASYARAKAT SATPOL PP |
| 9 | HAMRAN | L | KEC. BULO | KEC. BULO | HOTEL BUMI RAYA | 10 S/D 11-4-2019 | BIDANG PERLIDUNGAN MASYARAKAT SATPOL PP |
| 10 | WILONO | L | KEC. WONOMULYO | KEC. WONOMULYO | HOTEL BUMI RAYA | 10 S/D 11-4-2019 | BIDANG PERLIDUNGAN MASYARAKAT SATPOL PP |
| 11 | BASIRUN | L | KEC. WONOMULYO | KEC. WONOMULYO | HOTEL BUMI RAYA | 10 S/D 11-4-2019 | BIDANG PERLIDUNGAN MASYARAKAT SATPOL PP |
| 12 | SHUBRI | L | KEC. MAPILLI | KEC. MAPILLI | HOTEL BUMI RAYA | 10 S/D 11-4-2019 | BIDANG PERLIDUNGAN MASYARAKAT SATPOL PP |
| 13 | NAWIR | L | KEC. MAPILLI | KEC. MAPILLI | HOTEL BUMI RAYA | 10 S/D 11-4-2019 | BIDANG PERLIDUNGAN MASYARAKAT SATPOL PP |
| 14 | NURSAHIDA | P | KEC. CAMPALAGIAN | KEC. CAMPALAGIAN | HOTEL BUMI RAYA | 10 S/D 11-4-2019 | BIDANG PERLIDUNGAN MASYARAKAT SATPOL PP |
| 15 | SUKRI | L | KEC. CAMPALAGIAN | KEC. CAMPALAGIAN | HOTEL BUMI RAYA | 10 S/D 11-4-2019 | BIDANG PERLIDUNGAN MASYARAKAT SATPOL PP |
| 16 | AL[| L | KEC. TAPANGO | KEC. TAPANGO | HOTEL BUMI RAYA | 10 S/D 11-4-2019 | BIDANG PERLIDUNGAN MASYARAKAT SATPOL PP |
| 17 | SUMARDI | L | KEC. TAPANGO | KEC. TAPANGO | HOTEL BUMI RAYA | 10 S/D 11-4-2019 | BIDANG PERLIDUNGAN MASYARAKAT SATPOL PP |
| 18 | LU'DIN | L | LEC. LUYO | LEC. LUYO | HOTEL BUMI RAYA | 10 S/D 11-4-2019 | BIDANG PERLIDUNGAN MASYARAKAT SATPOL PP |
| 19 | HARI | L | KEC. LUYO | KEC. LUYO | HOTEL BUMI RAYA | 10 S/D 11-4-2019 | BIDANG PERLIDUNGAN MASYARAKAT SATPOL PP |
| 20 | SAPRIADI | L | KEC. ALU | KEC. ALU | HOTEL BUMI RAYA | 10 S/D 11-4-2019 | BIDANG PERLIDUNGAN MASYARAKAT SATPOL PP |
| 21 | MUHDAR | L | KEC. ALU | KEC. ALU | HOTEL BUMI RAYA | 10 S/D 11-4-2019 | BIDANG PERLIDUNGAN MASYARAKAT SATPOL PP |
| 22 | MUHAMMAD ASRUL | L | TINAMBUNG | TINAMBUNG | HOTEL BUMI RAYA | 10 S/D 11-4-2019 | BIDANG PERLIDUNGAN MASYARAKAT SATPOL PP |
| 23 | SALEH SAYANG | L | KEC. TINAMBUNG | KEC. TINAMBUNG | HOTEL BUMI RAYA | 10 S/D 11-4-2019 | BIDANG PERLIDUNGAN MASYARAKAT SATPOL PP |
| 24 | IBRAHIM SUAIB S.PD | L | KEC. BALANIPA | KEC. BALANIPA | HOTEL BUMI RAYA | 10 S/D 11-4-2019 | BIDANG PERLIDUNGAN MASYARAKAT SATPOL PP |
| 25 | NIRMA, SE. | L | KEC. BALANIPA | KEC. BALANIPA | HOTEL BUMI RAYA | 10 S/D 11-4-2019 | BIDANG PERLIDUNGAN MASYARAKAT SATPOL PP |
| 26 | MUSTAMIN | L | KEC. LIMBORO | KEC. LIMBORO | HOTEL BUMI RAYA | 10 S/D 11-4-2019 | BIDANG PERLIDUNGAN MASYARAKAT SATPOL PP |
| 27 | SUPRIADI | L | KEC. LIMBORO | KEC. LIMBORO | HOTEL BUMI RAYA | 10 S/D 11-4-2019 | BIDANG PERLIDUNGAN MASYARAKAT SATPOL PP |
| 28 | MUSLIMIN, A. | L | KEC. MATAKALI | KEC. MATAKALI | HOTEL BUMI RAYA | 10 S/D 11-4-2019 | BIDANG PERLIDUNGAN MASYARAKAT SATPOL PP |
| 29 | HASAN | L | KEC. MATAKALI | KEC. MATAKALI | HOTEL BUMI RAYA | 10 S/D 11-4-2019 | BIDANG PERLIDUNGAN MASYARAKAT SATPOL PP |
| 30 | MUHAJIR | L | KEC. MATAKALI | KEC. MATAKALI | HOTEL BUMI RAYA | 10 S/D 11-4-2019 | BIDANG PERLIDUNGAN MASYARAKAT SATPOL PP |

Jumlah Kecamatan yang Mengutus Tenaga Satlinmas pelatihan x 100%

Jumlah Kecamatan

14 Kecamatan 100% = 87,5 %

16 Kecamatan

Perbandingan Tenaga satuan Perlindungan Masyarakat ditingkat Dusun adalah 1 Dusun 1 Orang anggota Linmas

Dengan Jumlah tenaga Satlinmas di wilayah Kabupaten Polewali Mandar adalah 1595 orang Sehingga Rasio Perbandingan 1 : 1 harus ditingkatkan menjadi 1 : 2 (satu Dusun 2 anggota Linmas) dan dibutuhkan pelatihan Dasar bagi Satuan Perlindungan Masyarakat .

Faktor Penghambat Pencapaian Target Kinerja Indikator 4 :

Faktor Penghambat pencapaian indikator 4 adalah :

1. Adanya Bencana Covid -19 sehingga anggaran untuk Pelatihan Dasar Satlinmas dihapus
2. Biaya Operasional Pendataan Satlinmas di Kecamatan dihapus

3.1.1.5. Capaian Sasaran 5 : Meningkatnya Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

Tabel 3.9

Meningkatnya Kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

| INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET | REALISASI | % |
|--|--------|--------|--------------|------|
| 1. Persentase kecamatan kesiapsiagaan bahaya bencana kebakaran | Persen | 88 | 14 Kecamatan | 87,5 |

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit pelaksana teknis daerah pada Dinas dan badan dilingkup Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar UPTD Pemadam kebakaran bergabung dibawah naungan Satpol PP dengan tingkat Eselon IV B terhitung Januari 2019 dengan Jumlah personil Damkar 84 Orang terdiri 3 orang PNS dan 81 Orang Non PNS .

Jumlah Kendaraan Pemadam yang beroperasi sebanyak 5 unit jangkauan Wilayah Manajemen Kebakaran Tahun 2021 adalah 120.137 Ha dengan 14 Kecamatan antara lain :

1. Kecamatan Polewali

2. Kecamatan Binuang
3. Kecamatan anreapi
4. Kecamatan Matakali
5. Kecamatan Tapango
6. Kecamatan Mapilli
7. Kecamatan Campalagian
8. Kecamatan Luyo
9. Kecamatan Tinambung
10. Kecamatan Balanipa
11. Kecamatan Limboro
12. Kecamatan Alu
13. Kecamatan Bulu
14. Kecamatan Wonomulyo

Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit 19 Kali , 3 Kasus tertangani semua tapi buan dalam waktu 15 menit dikarenakan jarak tempuh dari posko damkar ke titik lokasi, dan Jumlah Kasus Kebakaran dalam jangkauan WMK 22 Kali .

Tabel 3.10

Cakupan pelayanan bencana kebakaran wilayah kabupaten

| No | Uraian | Satuan | Tahun | | | | | | |
|--|--|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran | Ha | 97.187 | 120.137 | 120.137 | 120.137 | 120.137 | 120.137 | 120.137 |
| 2 | Luas Wilayah kabupaten | Ha | 202.230 | 202.230 | 202.230 | 202.230 | 202.230 | 202.230 | 202.230 |
| Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota | | % | 48% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% |

Tabel 3.11

Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

| No | Uraian | Satuan | Tahun | | | | | | |
|----|---|--------|-------|------|------|------|------|------|------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit | kali | 62 | 56 | 40 | 45 | 73 | 20 | 19 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| 2 | Jumlah kasus kebakaran dalam jangkuan WMK | kali | 62 | 56 | 40 | 45 | 73 | 23 | 22 |
| Tingkat waktu tanggap daerah layanan WMK | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 86,9% | 86,9% |

Gambar 25 .
 Penanggulangan Bencana Kebakaran



Tabel 3.12
 Daftar Sarana dan Prasarana Pemadaman
 UPTD Pemadam Kebakaran
 Kabupaten Polewali Mandar

| NO | NAMA SARANA | JUMLAH | KET |
|----|------------------------|---------|-----|
| 1. | Armada Mobil Kebakaran | 7 Unit | |
| 2 | APAR | 11 Unit | |
| 3 | Alcon Pengisapan Air | 3 Unit | |
| 4 | Alat Pemadam Portabel | 6 Unit | |
| 5 | Selang Air | 9 Unit | |
| 6 | Nozzel | 8 Unit | |
| 7 | Baju anti Panas | 6 Unit | |
| 8 | Sepatu Anti Panas | 6 Unit | |
| 9 | Helm Anti Panas | 6 Unit | |
| 10 | Baju anti api | 5 Unit | |
| 11 | Handy Talky | 9 Unit | |
| 12 | Set Tabung Oxigen | 2 Unit | |
| 13 | Masker O2/Asap | 4 buah | |

Gambar 26
 Pengadaan armada Mobil Tangki Pemadam Kebakaran Tahun 2021 sebanyak 4 Unit



Faktor Penghambat Pencapaian Target Kinerja Indikator 5 :

Faktor Penghambat pencapaian indikator 5 adalah :

1. Adanya Bencana Covid -19 sehingga 40% anggaran Pemadam kebakaran diantaranya Pelatihan Penanggulangan Bencana Kebakaran, Biaya Operasional Kelapangan terbatas
2. Tenaga PNS Pemadam Kebakaran Cuma 4 orang.
3. Tidak adanya anggaran Pelatihan Penanggulangan Kebakaran.

3.1.1.6. Capaian Sasaran 6 : Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran

Indikator Kinerja 6 : Indek Kepuasan Masyarakat /stakeholder

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 untuk meningkatkan kualitas manajemen perkantoran ada 25 Sasaran strategis dan target 2021 serta capaiannya

Tabel 3.13

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | CAPAIAN 2021 | TARGET 2021 |
|-----|--|---|--------------|-------------|
| (1) | (2) | (3) | | (4) |
| 1. | Meningkatnya kualitas pengelolaan Surat Menyurat | Jumlah Surat masuk dan keluar yang terkelola | 356 Surat | 352 Surat |
| 2. | Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah Jenis kebutuhan komunikasi, air dan listrik yang terpenuhi | 2 Jenis | 3 Jenis |
| 3. | Meningkatnya kualitas pengelolaan Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas / Operasional | Jumlah unit kendaraan yang dilengkapi surat izin | 6 Unit | 9 Unit |
| 4. | Meningkatnya kebersihan gedung dan halaman kantor | Luas Gedung dan halaman kantor kondisi bersih | 504 m2 | 504 m2 |
| 5. | Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor | Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia | 35 Jenis | 38 Jenis |

| | | | | |
|-----|--|--|------------|-------------|
| 6. | Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan | Jumlah jenis cetak dan penggandaan yang tersedia | 3 Jenis | 3 Jenis |
| 7. | Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor | Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan yang tersedia | 14 Jenis | 55 Jenis |
| 8. | Terpenuhinya kebutuhan alat rumah tangga | Jumlah jenis alat-alat rumah tangga yang tersedia | 46 | 46 Jenis |
| 9. | Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum | Jumlah makan minum yang tersedia | 1 Jenis | 3 Jenis |
| 10. | Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi luar daerah | Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi luar daerah | 35 Laporan | 51 Laporan |
| 11. | Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam daerah | Jumlah Laporan koordinasi dan konsultasi dalam daerah | 20 Laporan | 25 Laporan |
| 12. | Terpenuhinya kebutuhan mebeleur kantor | Jumlah jenis mebeleur | 6 Jenis | 6 Jenis |
| 13. | Terpenuhinya kebutuhan alat studio dan komunikasi | Jumlah jenis alat studio dan komunikasi yang tersedia | 8 Jenis | 8 Jenis |
| 14. | Terpenuhinya kebutuhan komputer PC/ Note Book dan kelengkapannya | Jumlah unit komputer PC/ notebook | 10 Unit | 10 Unit |
| 15. | Terpeliharanya gedung kantor secara rutin/berkala | Luas bangunan dan halaman kantor yang terpelihara | 504 m2 | 504 m2 |
| 16. | Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional secara rutin/berkala | Jumlah unit kendaraan dinas yang terpelihara | 4 Unit | 7 Unit |
| 17. | Terpeliharanya peralatan gedung kantor secara rutin/berkala | Jumlah unit peralatan gedung kantor yang terpelihara | 10 Unit | 20 Unit |
| 18. | Terpeliharanya mebeleur secara rutin/berkala | Jumlah jenis mebeleur yang terpelihara | - | 8 Jenis |
| 19. | Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi , pageduan dan apirasi publik | Jumlah jenis layanan yang terkelola | - | 3 Jenis |
| 20. | Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas beserta perlengkapannya | Jumlah pakaian dinas yang tersedia | - | 1541 Pasang |
| 21. | Meningkatnya kompetensi pegawai | Jumlah Pegawai yang menyelesaikan, | - | 5 Orang |

| | | | | |
|-----|---|--|-----------|-----------|
| | | pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis | | |
| 22. | Meningkatnya kualitas penataan administrasi kepegawaian | Jumlah jenis Administrasi Kepegawaian yang terkelola dengan tertib | 5 Jenis | 5 Jenis |
| 23. | Terpenuhinya bahan bacaan dan Peraturan Per Undang Undangan | Jumlah jenis bahan bacaan | 3 Jenis | 3 Jenis |
| 24. | Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor | 20 Jenis | 20 Jenis |
| 25. | Terpenuhinya kebutuhan Penagamanan Kantor | Jumlah tenaga Bantu Satpol PP | 120 orang | 120 orang |

Tabel 3.14

Pagu Anggaran Kegiatan Saat Perjanjian Kinerja dan Setelah Revisi
anggaran Tahun 2021

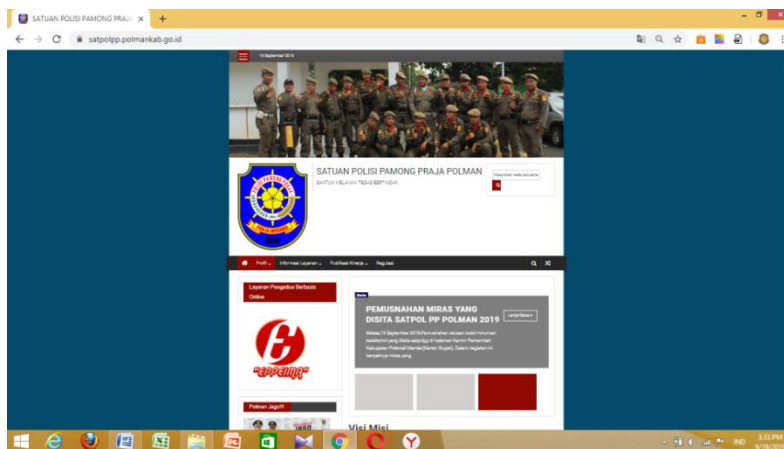
| NO URUT | KODE REKENING | PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN | SEBELUM | SESUDAH | BERTAMBAH/BERKURAG | KETERANGAN |
|---------|-----------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|--|
| | 1.05.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA | Rp 10.996.045.412 | Rp 11.716.064.911 | Rp 720.019.499 | |
| I | 1.05.01.2.01 | Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Rp 16.269.480 | Rp 16.269.480 | Rp - | |
| 1 | 1.05.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Rp 6.421.200 | Rp 6.421.200 | Rp - | |
| 2 | 1.05.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Rp 2.712.280 | Rp 2.712.280 | Rp - | |
| 3 | 1.05.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Rp 4.495.000 | Rp 4.495.000 | Rp - | |
| 4 | 1.05.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Rp 2.641.000 | Rp 2.641.000 | Rp - | |
| II | 1.05.01.2.02 | Administrasi keuangan Perangkat Daerah | Rp 8.617.399.605 | Rp 9.337.419.104 | Rp 720.019.499 | |
| 5 | 1.05.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Rp 8.612.997.005 | Rp 9.333.016.504 | Rp 720.019.499 | |
| 6 | 1.05.01.2.04 | Koordinasi dan Pelaksanaan akuntansi SKPD | Rp 1.781.000 | Rp 1.781.000 | Rp - | |
| 7 | 1.05.01.2.02.08 | Penyusunan Pelaporan analisis Prognosis realisasi Anggaran | Rp 2.621.600 | Rp 2.621.600 | Rp - | |
| III | 1.05.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Rp 64.349.900 | Rp 64.349.900 | Rp - | |
| 8 | 1.05.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atribut Perlengkapannya | Rp 58.350.000 | Rp 58.350.000 | Rp - | |
| 9 | 1.05.01.2.05.05 | Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai | Rp 5.999.900 | Rp 5.999.900 | Rp - | |
| IV | 1.05.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Rp 197.815.767 | Rp 192.521.167 | Rp (5.294.600) | |
| 10 | 1.05.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik & Penerangan bangunan Kantor | Rp 1.131.000 | Rp 1.131.000 | Rp - | |
| 11 | 1.05.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan perlengkapan Kantor | Rp 9.515.467 | Rp 9.515.467 | Rp - | |
| 12 | 1.05.01.2.06.04 | Penyediaan bahan Logistik Kantor | Rp 24.812.000 | Rp 24.812.000 | Rp - | |
| 13 | 1.05.01.2.06.05 | Penyediaan Barang cetakan dan Pengandaan | Rp 8.250.200 | Rp 8.250.200 | Rp - | |
| 14 | 1.05.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang Undangan | Rp 4.440.000 | Rp 4.440.000 | Rp - | |
| 15 | 1.05.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Rp 149.667.100 | Rp 144.372.500 | Rp (5.294.600) | Menggeser Ke BBM Operasional Satpol PP |
| V | 1.05.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp 85.817.900 | Rp 85.817.900 | Rp - | |
| 16 | 1.05.01.2.07.02 | Pengadaan Kendaraan dinas operasional atau lapangan | Rp 37.000.000 | Rp 37.000.000 | Rp - | |
| 17 | 1.05.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel | Rp 4.008.000 | Rp 4.008.000 | Rp - | |
| 18 | 1.05.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya | Rp 39.829.900 | Rp 39.829.900 | Rp - | |
| 19 | 1.05.01.2.07.11 | Pengadaan Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya | Rp 4.980.000 | Rp 4.980.000 | Rp - | |
| VI | 1.05.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp 1.961.342.960 | Rp 1.961.342.960 | Rp - | |
| 20 | 1.05.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Rp 4.998.000 | Rp 4.998.000 | Rp - | |
| 21 | 1.05.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi ,sumber daya air dan listrik | Rp 6.126.960 | Rp 6.126.960 | Rp - | |
| 22 | 1.05.01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor | Rp 4.900.000 | Rp 4.900.000 | Rp - | |
| 23 | 1.05.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor | Rp 1.945.318.000 | Rp 1.945.318.000 | Rp - | |
| VII | 1.05.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp 53.049.800 | Rp 58.344.400 | Rp 5.294.600 | |

| | | | | | | |
|------|-----------------|--|-------------------|-------------------|----------------|--|
| 24 | 1.05.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan | Rp 5.510.000 | Rp 5.510.000 | Rp - | |
| 25 | 1.05.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,biaya pemeliharaan ,pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan | Rp 34.997.000 | Rp 40.291.600 | Rp 5.294.600 | Penambahan Biaya BBM Kendaraan Dinas Operasional Satpol PP |
| 26 | 1.05.01.2.09.05 | Pemeliharaan Mebel | Rp 3.985.000 | Rp 3.985.000 | Rp - | |
| 27 | 1.05.01.2.09.09 | Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya | Rp 8.557.800 | Rp 8.557.800 | Rp - | |
| | 1.05.02 | PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Rp 342.370.985 | Rp 342.370.985 | Rp - | |
| VIII | 1.05.02.2.01 | Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) daerah Kabupaten /Kota | Rp 284.591.063 | Rp 284.591.063 | Rp - | |
| 28 | 1.05.02.2.01.01 | Pencegahan Gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dan cegah dini. Pembinaan dan Penindakan atas gangguan | Rp 15.851.908 | Rp 15.851.908 | Rp - | |
| 29 | 1.05.02.2.01.02 | ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada | Rp 217.990.000 | Rp 217.990.000 | Rp - | |
| 30 | 1.05.02.2.01.03 | Koordinasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Pemberdayaan Perlindungan | Rp 15.765.200 | Rp 15.765.200 | Rp - | |
| 31 | 1.05.02.2.01.04 | Masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum | Rp 14.999.905 | Rp 14.999.905 | Rp - | |
| 32 | 1.05.02.2.01.05 | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan satuan perlindungan masyarakat termasuk Kerjasama antar lembaga dan | Rp 9.989.200 | Rp 9.989.200 | Rp - | |
| 33 | 1.05.02.2.01.07 | kemitraan dalam tehnik Pencegahan dan Penanganan Gangguan | Rp 9.994.850 | Rp 9.994.850 | Rp - | |
| IX | 1.05.02.2.02 | Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten /Kota dan Peraturan Bupati/Walikota | Rp 57.779.922 | Rp 57.779.922 | Rp - | |
| 34 | 1.05.02.2.02.01 | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Bupati /Walikota | Rp 19.745.600 | Rp 19.745.600 | Rp - | |
| 35 | 1.05.02.2.02.02 | Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan Bupati/Walikota | Rp 10.145.247 | Rp 10.145.247 | Rp - | |
| 36 | 1.05.02.2.02.03 | Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota | Rp 27.889.075 | Rp 27.889.075 | Rp - | |
| | 1.05.04 | PROGRAM PENCEGAHAN , PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN Pencegahan Pengendalian | Rp 4.098.730.608 | Rp 4.098.730.608 | Rp - | |
| X | 1.05.04.2.01 | ,Pemadaman , Penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan | Rp 4.098.730.608 | Rp 4.098.730.608 | Rp - | |
| 37 | 1.05.04.2.01.02 | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam daerah Kabupaten /Kota | Rp 4.098.730.608 | Rp 4.098.730.608 | Rp - | Pergeseran Pagu untuk Pembayaran Lampu sirine dan Suku Cadang serta keperluan Damkar Lainnya |
| | | | Rp 15.437.147.005 | Rp 16.157.166.504 | Rp 720.019.499 | |

Indeks Kepuasan Masyarakat /Stakeholder Tahun 2021 Satuan Polisi Pamong Praja mendapatkan Predikat Baik:

1. Satpol PP masuk 10 OPD Percotohan yang pada 8 Penilaian Reformasi Birokrasi
2. Dala mewujudkan Pelayanan publik yang baik Satpol PP membuka Pengaduan Masyarakat melalui media sosial seperti website Satpol PP :
satpolpp.polmankab.go.id maupun Via Whatapp .
3. Keterbukaan Informasi Publik sangat didukung dengan Adanya kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik dan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dilakukan secara berkala salat Satu bukti Keterbukaan informasi publik pada Satuan Polisi Pamong Praja adalah kegiatan yang telah dilaksanakan Satpol PP dan Damkar dipublikasi secara umum melalui beberapa media sosial seperti :

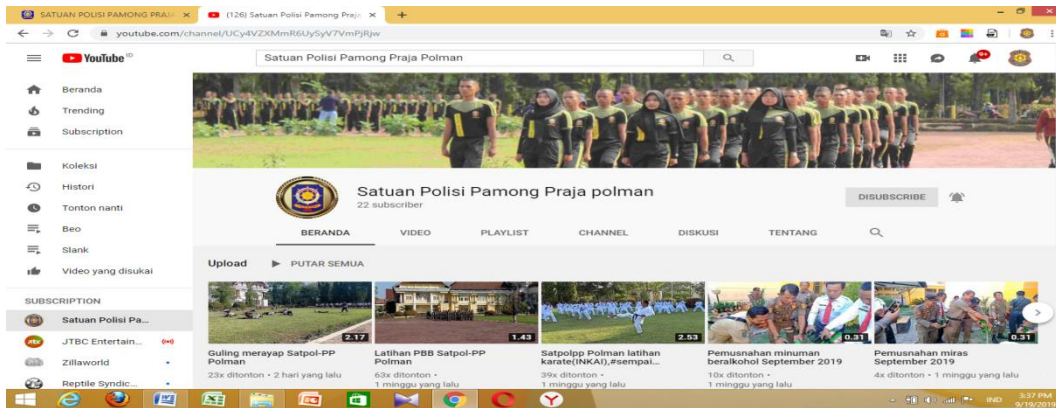
➤ Website (satpolpp.polmankab.go.id)



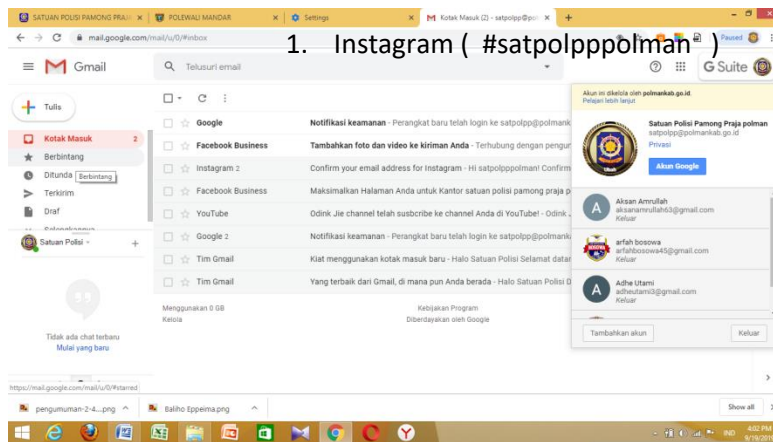
➤ Facebook (Satuan Polisi Pamong Praja Polman) .



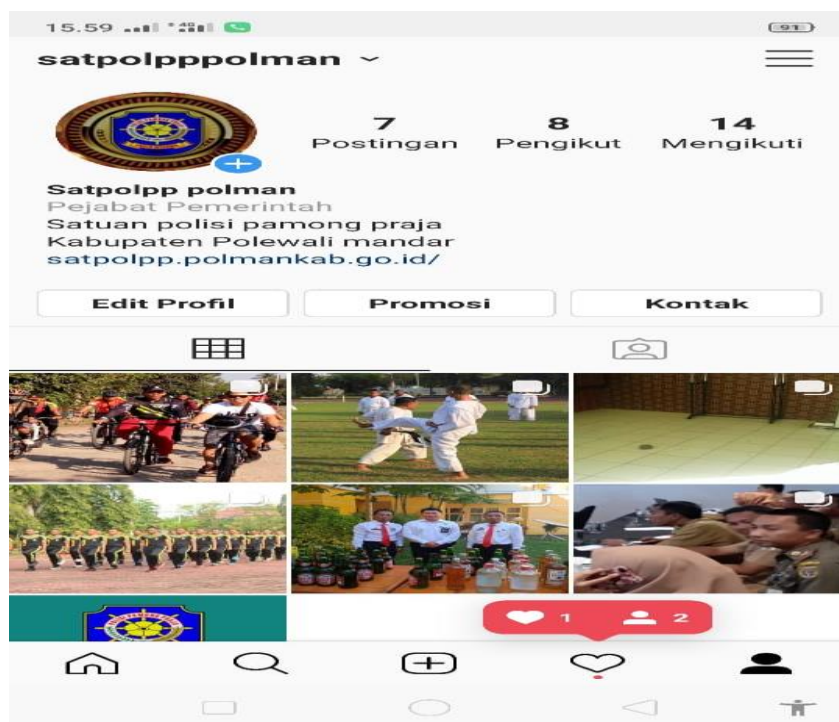
➤ Youtube (Satuan Polisi Pamong Praja Polman)



➤ Email (satpolpp@polmankab.go.id)



➤ Instagram



Faktor Penghambat Pencapaian Target Kinerja Indikator 6 :

Faktor Penghambat pencapaian indikator 6 adalah :

4. *Adanya Bencana Covid -19 sehingga 80 % anggaran Manajemen Perkantoran di Pangkas*

3.1.1.7. Capaian Sasaran 7 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja

Indikator Kinerja 7 : Predikat SAKIP Perangkat daerah

Peningkatan akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja didukung dengan beberapa faktor , Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi **Akuntabilitas Kinerja** Satuan Polisi Pamong Praja adalah :

1. Keterlibatan Pimpinan dalam Penyusunan RENSTRA
2. Pemantauan Pencapaian kinerja secara berkala
3. Memahami kinerja yang harus dicapai setiap tahun

Untuk Pengelolaan akuntabilitas Kinerja sangat perlu adanya upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja dan Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara berkala .

diharapkan disiplin kerja petugas Satpol PP akan meningkat, sehingga pelaksanaan pengukuran Kinerja berjalan dengan baik.

Peredikat SAKIP Satpol PP Tahun 2021 adalah B

Faktor Penghambat Pencapaian Target Kinerja Indikator 7 :

Faktor Penghambat pencapaian indikator 7 adalah :

1. *Adanya Bencana Covid -19 sehingga 80 % anggaran di Pangkas*

3.1.1.8. Capaian Sasaran 8 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah

Indikator Kinerja 8 : Opini Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah

Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2021 mendapatkan opini WTP dibuktikan dengan tidak adanya temuan terkait perencanaan Anggaran dan Pengelolaan Keuangan selama satu tahun pada Satuan Polisi Pamong Praja.

Faktor Penghambat Pencapaian Target Kinerja Indikator 8 :

Faktor Penghambat pencapaian indikator 8 adalah :

Adanya Bencana Covid -19 sehingga 80 % anggaran di Pangkas

3.2. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas keuangan Satuan Polisi Pamong Praja menyajikan capaian realisasi anggaran sebagai hasil pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2021. Pada dasarnya Akutabilitas keuangan merupakan tolak ukur keberhasilan dalam mempertanggungjawabkan capaian kinerja terhadap pengelolaan dan pengendalian keuangan.

Pada Tahun 2021 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar mempunyai pagu Anggaran Belanja sebesar Rp16.157.166.504,- yang dialokasikan untuk pelaksanaan 3 program dan 10 kegiatan dan 37 Sub Kegiatan . Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp 15.610.197.538,- dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dan capaian keuangan sebesar 99,9%, terjadi kenaikan pagu dibanding tahun 2020 dengan pagu sebesar Rp11.174.454.739,-. Ini dikarenakan kenaikan Pagu Gaji PNS dimana beberapa PNS mengalami kenaikan pangkat dan golongan serta bertambahnya tunjangan Fungsional Satpol PP. Dalam pencapaian realisasi fisik terjadi peningkatan dibanding tahun 2020 yang realisasinya 99 % menjadi 96,9 % ditahun 2021. Sebagai gambaran dapat dilihat secara rinci pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.15

Belanja Aparatur Tahun 2020

| No | Uraian | Rencana (Rp) | Realisasi (Rp) | Alokasi (%) |
|------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| 1 | Belanja Tidak Langsung | Rp 7.645.031.221 | Rp 7.560.783.243 | 98,89 |
| 2 | Belanja Langsung | Rp 3.529.423.518 | Rp 3.527.502.988 | 99,99 |
| Total Belanja Aparatur | | Rp 11.174.454.739 | Rp 11.088.286.231 | 98,99 |

Dari tabel dapat kita jelaskan bahwa Belanja Langsung direncanakan Rp. 3.529.423.518,-terrealisasi sebesar Rp.3.527.502.988,-atau Persentase Alokasi sebesar 98.99%, sedangkan sisanya adalah belanja tidak langsung direncanakan Rp. 7.645.031.221,-terrealisasi sebesar Rp. 7.560.783.243,- atau Persentase Alokasi sebesar 98.89%

Tabel 3.16

Belanja Aparatur Tahun 2021

| No | Uraian | Rencana (Rp) | Realisasi (Rp) | Alokasi (%) |
|------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| 1 | Belanja Tidak Langsung | Rp 9.333.016.504 | Rp 8.833.513.563 | 94,6 |
| 2 | Belanja Langsung | Rp6.824.150.000 | Rp6.776.683.975 | 99,3 |
| Total Belanja Aparatur | | Rp16.157.166.504 | Rp15.610.197.538 | 96,6 |

Dari tabel dapat kita jelaskan bahwa Belanja Langsung direncanakan Rp Rp6.824.150.000,-terrealisasi sebesar Rp6.776.683.975,-atau Persentase Alokasi sebesar 99.3%, sedangkan sisanya adalah belanja tidak langsung direncanakan Rp. 9.333.016.504,-terrealisasi sebesar Rp.8.833.513.563,- atau Persentase Alokasi sebesar 94.6%



4.1. SIMPULAN

Berdasarkan uraian pada Bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar, pencapaian sasaran yang diinginkan tahun anggaran 2021 sesuai dengan indikator capaian kinerja secara keseluruhan mencapai 93,75 %. Secara kelembagaan Satpol PP pada tahun 2019 mendapatkan predikat **Wilayah Bebas Korupsi** (WBK), predikat ini dicapai karena tidak ada temuan kerugian negara selama 2 tahun berturut-turut pada Satuan Polisi Pamong Praja. Disamping itu, untuk hasil Penilaian Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, Satuan Polisi Pamong Praja menempati posisi urutan kedua diantara SKPD yang ada di Polewali Mandar.

Untuk mencapai Target Kinerja yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja perlu adanya komunikasi yang lebih insentif antar SKPD yang menjadi stakeholder dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah. Sangat dibutuhkan kerjasama dalam mensosialisasikan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang ada di Kabupaten Polewali Mandar.

4.2. SARAN

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar, dibutuhkan dana yang cukup terutama dalam peningkatan SDM anggota dalam penegakan perda.

Selanjutnya untuk optimalisasi pemberian pelayanan kepada masyarakat serta pelaksanaan tugas lainnya, dibutuhkan sarana dan prasarana perkantoran yang memadai.

Demikian laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan atau laporan kinerja dan iktisar realisasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja anggaran 2021.

Polewali, 1 Februari 2022



KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

ARIFIN HALIM, S.Sos.MSi

Pangkat : Pembina TK.I

Nip : 19670319 200012 1 003